

BIROKRAT DAN AKTIVITAS POLITIK
(Studi Kasus Rapimda Partai Golkar Tahun 2016)



Skripsi

Diajukan Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan

Politik Jurusan Ilmu Politik

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD MAULANA YUSUF RAMLI

NIM:30600113077

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Maulana Yusuf Ramli

Nim : 30600113077

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Program Studi : S1

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat & Politik

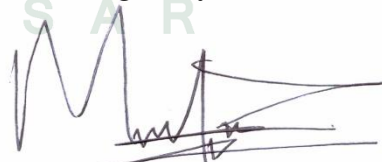
Judul Skripsi : **Birokrat dan Aktivitas Politik (Studi Kasus Rapimda Partai Golkar Tahun 2016)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/ penelitian saya sendiri dan bukan plagiansi dari karya/ penelitian orang lain

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Samata, 30 Januari 2018

Yang menyatakan



Muhammada Maulana Yusuf Ramli
Nim:30600113077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Birokrat dan Aktivitas Politik (Studi Kasus Rapimda Partai Golkar Tahun 2016)”, yang disusun oleh Muhammad Maulana Yusuf Ramli, Nim: 30600113077, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang di selenggarakan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata Gowa, 30 Januari 2018M

13 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Abdullah, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Moh. Natsir, MA
NIP. 19590704 198003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subyektif bagi diri penulis. Untuk itu perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar, justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, inilah hasil maksimal yang dapat disumbangkan yang senantiasa menyisipkan kekurangan dan kelemahan, sehingga untuk hal inipun penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Ramli Marzuki, S.Sos, M.Si** dan Ibu **Andi Suheriaty**, Tak mudah merangkai kata-kata untuk menggambarkan pengorbanan Bapak dan Ibu selama ini, dan juga kepada adik-adikku yang tercinta Abdur Rahman Ramli, Syamsul Alam Ramli, Muh Imam Alpayyed Ramli, Arafat Akbar Ramli dan Suci Ramadhani Zahra

yang selalu mendukung dalam dalam setiap perjuangan, kertas ini tidak akan pernah cukup untuk mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf, tanpa Bapak, ibu dan serta keluarga yang mendukung, yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil, nasehat, serta doa, sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala Rahmat-Nya dan semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA Selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan Bapak Syahrir Karim, S.Ag, M.Si. Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
4. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis
5. Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA Sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu terkait judul yang di angkat penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan perkuliahan dalam penyelesaian studi.
7. Teman-teman Ikatan Pelajar-Mahasiswa Lamuru (IPMAL) yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Temat-teman Jurusan Ilmu Politik angkatan 2013, terutama Ilmu Politik kelompok 5-6 (Irsang, Paisal, Sudirman, Sulpadli, Deen, Rahmi, Yumi, Aswan, Ibnu, Fian, Uni, Maskur, Ilham, Irshan Zulfikar, Ayu, Agung, Arief, Nurtakwa, Siti, Sahid, Wiwi, Asdar, Eka, Wowo.)
9. Teman-teman KKN angkatan 53 di Posko Pattallikang, Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (Amaliah, Ayu, Adnin, Linda, Heri, Nandar, Rian, dan Budi).

Besar harapan, mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat bermafaat dan maslahat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Samata, 30 Januari 2018


Muhammad Maulana Yusuf Ramli
Nim: 30600113077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Teoritik	17
1. Mobilisasi Politik	17
2. Teori Kekuasaan	19
3. Birokrasi	21
4. Partai Politik	25
B. Kerangka Konseptual.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Subyek dan Obyek Penelitian	33
E. Jenis Data	33
F. Metode Pengumpulan Data	34

G. Instrumen Penelitian	36
H. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Bentuk Mobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru dalam Kegiatan Partai Golkar Tahun 2016	48
1. Mobilisasi Secara Langsung	50
2. Mobilisasi Tidak Secara Langsung	65
C. Respon masyarakat terhadap Mobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016	71
1. Respon Masyarakat Tidak Setuju	72
2. Respon Masyarakat Setuju	76

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi Penelitian	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Daftar Informan.....	36
2. Tabel 2. Statistik Kependudukan Kecamatan Lamuru Tahun 2016.....	41
3. Table 3. Daftar Instansi/Kantor Jabatan Dinas.....	47



ABSTRAK

Nama : Muhammad Maulana Yusuf Ramli
Nim : 30600113077
Judul : Birokrat dan Aktivitas Politik (Studi Kasus Rapimda Partai Golkar Tahun 2016)

Skripsi ini membahas tentang bentuk mobilisasi aparatur sipil negara di Kecamatan Lamuru Kab Bone dalam kegiatan partai Golkar Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari tahu bentuk mobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan partai Golkar Tahun 2016, serta bagaimana respon masyarakat terhadap mobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan partai Golkar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan (Rapimda) partai Golkar Tahun 2016, melalui pemanfaatan kekuasaan jabatan, pemanfaatan fasilitas pemerintah, pemanfaatan hubungan kekeluargaan dan menggunakan media sosial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk proses mobilisasi yaitu, *pertama*, Mobilisasi secara langsung ada beberapa proses-proses mobilisasi aparatur sipil negara yaitu, a. Kewajiban ASN hadir di acara partai Golkar, kekuasaan rezim berkuasa mampu memobilisasi aparatur sipil negara untuk hadir dan wajib terlibat dalam rapimda partai Golkar Tahun 2016. b. pemanfaatan fasilitas pemerintah, pemanfaatan fasilitas pemeritahan dijadikan sebagai mesin politik untuk mobilisasi massa dalam kegiatan partai Golkar. *Kedua*, Mobilisasi tidak secara langsung menunjukkan ada dua proses-proses mobilisasi yaitu, a. memanfaatkan hubungan kekeluargaan, keluarga yang memiliki anggota ASN seringkali mengalihkan dukungannya ke partai mereka karna adanya kebutuhan balas jasa oleh keluarga yang jadi kader partai Golkar. b. Menggunakan media sosial, media sosial sebagai alat politik rezim yang berkuasa untuk memberikan informasi dalam memobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan rapimda partai Golkar Tahun 2016. Terdapat pula dalam hasil penelitian ini yaitu beberapa respon masyarakat yaitu, *pertama* respon masyarakat setuju mobilisasi ASN, alasan masyarakat bahwa aparatur sipil negara terlibat hanya memberikan pelayanan publik bukan ikut aktivitas politik partai. *Kedua*, respon masyarakat tidak setuju, alasan masyarakat bahwa pelayanan seorang ASN hanya tertuju pada pelayanan kepada atasan bukan tertuju kepada pelayanan masyarakat.

Implikasi penelitian ini diharapkan Memberikan pemahaman terhadap birokrasi dan aktivitas politik dalam setiap kegiatan kepartaian serta dapat memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini, di satu sisi digambarkan sebagai organisasi yang tidak efisien, berbelit-belit, penganut slogan "kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah, tambun yang kian hari kian bengkak jumlah pegawainya, dan korup. Sebuah gambaran yang membuat kita menjadi tidak *respect* dan takut untuk berhubungan dengan birokrasi. Daripada mencari masalah lebih baik berusaha tidak berurusan dengan yang namanya birokrasi. Birokrasi Indonesia dinilai lekat dengan kelambanan, bertele-tele, dan korupsi.¹

Di sisi lain, birokrasi digambarkan sebagai organisasi dimana bisa meraih segalanya bagi siapa saja pemenang sebuah pemilihan, mulai dari uang, jabatan, dan kekuasaan. Dua gambaran yang kontradiktif, karena gambaran pertama disampaikan oleh masyarakat bawah dan gambaran kedua disampaikan oleh penguasa (elit).²

Kondisi birokrasi seperti itu tidak terlepas dari faktor sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari jaman kerajaan-kerajaan, dimana birokrasi (yang dikuasai oleh raja) dimanifestasikan sebagai Tuhan yang harus dipatuhi segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya, dan rakyat yang dimanifestasikan sebagai hamba yang harus mematuhi segala perintah dan larangannya. Hubungan ini menuntut kepatuhan tanpa syarat dari hamba kepada Tuhannya dengan gambaran

¹Rusfi Yunairi dan Abdul Hakim, *Pemimpin Dan Reformasi Birokrasi*. (Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013), h.1.

²Setiyono dan Budi, *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administras.*, (Semarang: Penerbit Puskodak Fisip Undip. 2007), h. 29-30.

”manunggaling kawula dan Gusti (bersatunya rakyat dan Tuhan).”³ Hal inilah yang perlu diketahui bersama bahwa agama telah memberikan panduan terhadap umat manusia untuk tetap berada pada koridor yang benar dalam mengembangkan amanah, serta kepercayaan, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁴

Dengan memahami urgensi firman Tuhan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perlunya pemahaman birokrasi menyampaikan amanat yang berhak, bahwasanya birokrasi sebagai manifestasi bersatunya rakyat dan Tuhan. Birokrasi di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pada masa awal kemerdekaan ada semacam kesepakatan pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat menjangkau rakyat sampai ke desa-desa.⁵

Akan tetapi pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru (era pemerintahan Soeharto), kuatnya fondasi kekuasaan Soeharto didukung oleh

³Ngadisah, dan Darmanto. *Birokrasi Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008), h.31.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Duta Surya, 2012). h.113.

⁵Agus Suryono, *Birokrasi dan Kearifan Lokal*. (Malang:UB press,2012), h.30.

mesin-mesin utamanya; Golkar, militer, birokrasi teknokrat dan para borjuasi yang hidup dari kebaikan Soeharto. Kekuasaan yang dimiliki Soeharto menyebabkan dirinya dapat melakukan apa saja untuk memperkokoh kekuasaannya.⁶

Sehingga Birokrasi lebih jelas keberpihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini Golkar. Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (menjadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar.⁷

Rezim Orde Baru merupakan rezim yang sangat menonjolkan kekuasaan negara yang sentralistik. Negara tampil sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kelompok masyarakat manapun juga. Jaringan negara terutama lembaga-lembaga eksekutif, telah berkembang menjadi alat-alat efektif dalam mengelola dan menangani mobilisasi untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Pada masa itu, birokrasi cenderung dijadikan sebagai mesin politik pada proses pemilihan umum. Organisasi birokrasi yaitu Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) dijadikan bagian dari salah satu jalur di dalam Golkar, yaitu jalur B yang berguna untuk memperkuat dukungan pegawai negeri dalam setiap pemilihan umum. Pegawai negeri diharuskan untuk

⁶Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*, (Makassar: PT.Gramasurya. 2015), h.173.

⁷Agus Suryono, Pendekatan Kultural Dan Struktural Dalam Realitas Birokrasi Di Indonesia, Malang, (*Jurnal Administrasi Pembangunan* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas, Vol.24, No. 3,Brawijaya. 2011), h.1-3.

hanya menyalurkan aspirasi politik mereka melalui Golkar dengan memberlakukan kebijakan monoloyalitas.⁸

Dominasi politik di birokrasi, menurut Mahrus Irsyam, tidak semata-mata disebabkan oleh faktor politik saja, tetapi didukung oleh kultur Pegawai Negeri Sipil yang dibawa dari lingkungan sosialnya yang lebih mengutamakan pola hubungan patron klien atau pola hubungan paternalistik. Akibatnya loyalitas ASN pada profesi bergeser menjadi loyal kepada pribadi atasannya. Selama setengah abad, hak politik ASN berjalan mengikuti hak politik dari atasan ASN.⁹

Tingginya intervensi pejabat politik yang dipercayakan untuk memimpin birokrasi justru semakin memperkeruh dan mengkokohkan predikat buruknya birokrasi di daerah. Hal tersebut dapat ditemui dalam ciri-ciri relasi politik – birokrasi seperti praktek lobi-lobi untuk mencari posisi jabatan, intervensi politik dalam penentuan jabatan, dan ketidaknyaman pejabat birokrasi daerah yang berada dalam arena permainan politik daerah. Eforia demokrasi menyebabkan para politisi justru keluar dari esensi demokrasi dengan memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan. Birokrasi pun akhirnya menyambut perilaku politik tersebut, sehingga berakhir dengan “perselingkuhan” yang mengkhianati rakyat.¹⁰

Dalam Islam prinsip empati hanya dimiliki oleh para pemimpin yang tanggap terhadap lingkungannya. Pemimpin yang memiliki prinsip ini akan selalu

⁸M. Adian Firnas, Politik Dan Birokrasi : Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi, (*Jurnal Review Politik*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol.6, No.1, Juni. 2016), h.161

⁹Sri Yuliani, Netralitas Birokrasi : Alat Politik Atau Profesionalisme, Semarang, (*Jurnal “Dinamika”* Fisip UNS Vol.3 No.2 Th.2003), h.8.

¹⁰http://www.kompasiana.com/elipheldan/birokrasi-vs-politik_ diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 13:37 wita

dekat dengan masyarakat, baik itu bawahan maupun orang yang dilayani. Ia akan bahagia kalau bawahan atau pelanggannya (orang yang dilayani) menjadi bahagia, dan ia akan resah bila mereka mengalami kesulitan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹¹

Misalnya pada Kegiatan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan (elektoral) tidak hanya dilakukan oleh dan melalui partai politik tetapi juga dapat dilakukan melalui instrumen mobilisasi politik non partai politik. Masifnya mobilisasi politik elektoral pemerintah yang memanfaatkan partai bentukan pemerintah, yaitu Golkar dan pengerahan birokrasi sebagai instrumen mobilisasi politik pada pemilu-pemilu orde baru, menyebabkan jaringan mobilisasi politik partai-partai di luar Golkar terkikis. Konteks hegemoni pemerintah yang memanfaatkan partai Golkar sebagai intrumen politik kekokohan kekuasaan ini

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Surya,2012).h. 90.

menandai titik balik peran partai politik yang mengalami masa kejayaannya.¹²

Bukan lagi pada era Orde Baru tapi di era reformasi sekarang serangkaian acara pun dilakukan untuk memobilisasi ASN untuk hadir dalam acara kepartaian tersebut, dimana Ribuan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diduga dimobilisasi untuk menghadiri serangkaian acara pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Sulsel yang digelar di Bone, pada Jumat 21 dan Sabtu 22 Oktober 2016.

Mobilisasi PNS untuk menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) tahun ini diperkuat dengan adanya pengakuan sejumlah ASN dan tenaga Honorer yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, dimana mereka diinstruksikan wajib hadir dalam acara yang akan dihadiri Ketua DPP Golkar Setya Novanto.¹³

Pelibatan ASN pada Rapimda Golkar berdampak pada lengangnya kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Bone, puluhan kantor pemerintah terlihat lengang, bukan hal yang mengherankan, karena Rapimda tersebut seakan lebih penting dari pelayanan masyarakat, terkait hal ini pemerintah di harapkan sadar diri.

Tidak hanya itu, menanggapi maraknya pemasangan atribut partai di beberapa instansi yang menunjukkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam politik. Adanya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri dan

¹²Kris Nugroho, "Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral, (*Jurnal Departemen Politik*, Vol.24, No.3. Tahun 2011), h.213.

¹³Dapat dilihat [Http://HMI Bone Sesalkan Keterlibatan PNS di Rapimda Golkar _ Rakyat Sulsel.html](http://HMI Bone Sesalkan Keterlibatan PNS di Rapimda Golkar _ Rakyat Sulsel.html), diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 20.05 Wita.

memeriahkan seluruh rangkaian Rapimda juga menunjukkan ketidakdewasaan pemangku kekuasaan dalam menjalankan fungsi politiknya dan fungsinya sebagai pemimpin yang layak untuk dijadikan contoh. Apalagi kasus memobilisasi Pegawai Negeri Sipil, itu sudah mencederai independensi Pegawai Negeri Sipil dan bangunan demokrasi di Bone.¹⁴

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menyatakan: Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.¹⁵

Hal ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan sanksi bagi ASN yang terlibat aktif dalam kegiatan politik adalah pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sementara bagi ASN yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, dapat dilakukan asalkan ia mengundurkan diri sebagai ASN.¹⁶

¹⁴[http:// Waduh, PNS di Bone 'Diwajibkan' Hadiri Acara Partai Golkar _ Bonepos - Berita Terkini Sulsel.html](http://Waduh, PNS di Bone 'Diwajibkan' Hadiri Acara Partai Golkar _ Bonepos - Berita Terkini Sulsel.html). diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 20.30 Wita.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, bab II, Pasal 3.

Hal ini berkaitan dengan Islam dalam Keharusan Berlaku, Bersifat adil Dan Menunaikan keadilan-keadilan dalam memerintah, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4:135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Manifestasi lain dari politik mobilisasi adalah orientasi partai-partai politik yang lebih terfokus kepada pemilihan pejabat-pejabat dan perebutan kekuasaan atas jabatan-jabatan tertentu daripada memperkuat basis ideologi anggota partai politik. Dalam hadits lain rasul s.a.w juga pernah bersabda :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya :

“Abu Said (Abdurrahman) bin Samurah r.a. Berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepada saya : ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Duta Surya,2012), h.131.

kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (Buchary, Muslim)''¹⁸

Makna dari hadits tersebut adalah, barang siapa meminta jabatan lalu diberikan maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah makruh (tidak disukai). Maksud dalam jabatan ini adalah pemerintahan, pengadilan, keuangan, dan lainnya. Barang siapa yang berambisi mendapatkan demikian maka dia tidak akan diberi pertolongan.

Realitas di banyak negara menunjukkan selama ini birokrasi cenderung menjadi kendaraan politik regim berkuasa untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya birokrat (Pegawai Negeri atau Aparatur Negara) tidak pernah bisa menjadi individu yang bebas dalam menentukan pilihan politik. Netralitas politik, monoloyalitas pegawai negeri ataupun istilah apapun menjadi justifikasi bagi upaya membungkam kebebasan ASN untuk menggunakan hak politiknya.¹⁹

Konteks Penggunaan mobilisasi politik di luar partai politik justru menunjukkan adanya krisis pelembagaan dalam hal pemanfaatan Aparatur Negara atau ASN. Realitas menunjukkan dalam beberapa kegiatan Partai Golkar yang berlangsung, marak terjadi politisasi birokrasi seperti dalam Rapimda Golkar, dan kegiatan lainnya.

¹⁸Al Nawawi, *Mutiara Riyadushshalihin*. (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), h.509.

¹⁹Dapat dilihat <https://ilmupemerintahan.wordpress.com/tag/netralitas-birokrasi/> diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:30

Perkembangan Partai Golkar di Kecamatan Lamuru memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal memobilisasi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian.

Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru terhadap kegiatan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam reformasi birokrasi yang dicanangkan awal reformasi yang menghendaki birokrasi menjadi modern, dan netral. Hal inilah yang menjadi permasalahan meskipun dalam ketentuan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa pegawai negeri sipil tidak diperkenankan terlibat dalam partai politik akan tetapi pemangku kekuasaan tidak segan-segan memanfaatkan birokrasi memobilisasi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil untuk ikut serta dalam Rapimda Partai Golkar ataupun acara kegiatan kepartaian.

Melihat fenomena diatas, maka dirasakan perlu untuk mengkaji sebuah penelitian tentang "Birokrat Dan Aktivitas Politik (Studi Terhadap Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Dalam Kegiatan Partai Golkar Tahun 2016) " termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah yang mempengaruhi Aparatur Sipil Negara. Dengan mengedepankan sikap netralitas sebagai peneliti dalam menganalisis fenomena yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di tarik sebuah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk mobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016?

2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Mobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan manfaat penelitian. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait birokrasi dan Golkar menjadi suatu keinginan peneliti untuk meneliti dan mengkaji dengan tujuan dan kegunaan :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Bentuk Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016
- b. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Memobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

- a. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, pada khususnya dalam studi Ilmu Politik.
- b. Sebagai bahan masukan yang bersifat teoritis dalam penyusunan skripsi ini.

- c. Sebagai bahan tolak ukur dalam memahami Birokrat Dan Aktivitas politik.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dimaksud dengan tujuan untuk menghindari duplikasi disamping itu menunjukkan bahwa objek yang di teliti yaitu Birokrat dan aktivitasi Politik (studi terhadap mobilisasi aparatur sipil negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan partai Golkar Tahun 2016). Tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian-penelitian yang telah ada. Dari hasil tinjauan ditemukan beberapa refrensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya;

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitria Ramadhani Agusti Nasution dan Khairul Anwar.	Politik Mobilisasi Dalam Konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Kota Pekanbaru Tahun 2011	1. Siapakah aktor yang memobilisas i dalam pemilihan umum kepala daerah langsung kota Pekanbaru tahun 2011 ? 2. Siapa saja aktor yang dimobilisas? 3. Apa isu yang di perdebatkan dalam Pemilihan Umum	Penelitian ini adalah metode kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa politik mobilisasi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah langsung Kota Pekanbaru tahun 2011 dipengaruhi oleh kesadaran, sesuku, dan konteks masyarakat setempat. Dalam penelitian ini menemukan bahwa benar ada terdapat mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 , Walikota Pekanbaru dan oknum-oknum, dimana maksud memobilisasi tersebut adalah untuk mencari dukungan suara

			Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011 ? 4. Apa strategi yang dilakukan sebagai pendukung berlangsungnya mobilisasi ?		kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Firdaus-Ayat) agar menang dalam Pemilu yang dilaksanakan. Segala upaya dilaksanakan, demi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. ²⁰
2	Dida Daniarsyah.	<i>Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia</i>	1. Bagaimana Realitas Birokrasi Tidak Netral ? 2. Bagaimana Praktek Dominasi Politik terhadap Birokrasi dan Birokrasi terhadap politik di Indonesia?	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Seiring dinamika reformasi yang telah bergulir sejak 17 tahun lamanya dan di tengah hiruk pikuk-nya praktek perpolitikan yang mewarnai kuatnya peran legislatif yang terpolarisasi kepada kepentingan pragmatis dan bukan polarisasi ideologis, serta aktor legislator yang terbatas dengan otoritas yang dimilikinya, tentunya mencari jalan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan yaitu dengan menggandeng birokrasi. \. maka muncul pertanyaan dalam situasi atau era seperti ini, manakah yang lebih dominan politik mempengaruhi kinerja birokrasi atau birokrasi yang mempengaruhi politik dalam membuat kebijakan. Dan dapatkah birokrasi memposisikan dalam

²⁰Fitria Ramadhani Agusti Nasution dan Khairul Anwar, Politik Mobilisasi Dalam Konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Kota Pekanbaru Tahun 2011, (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.11, No.1, Januari 2011), h.20.

					<p>netralitas politik. Dominasi politik lebih kuat dan kental kepada birokrasi terutama dalam pembuatan kebijakan penyusunan anggaran belanja negara dan melakukan tekanan-tekanan politik kepada eksekutif terkadang membuat kegaduhan dalam eksekutif. Kendati demikian politik birokrasi dapat memainkan perannya sebagai aktor implementasi kebijakan mampu melakukan <i>bargaining</i> seperti halnya kasus konflik internal partai.²¹</p>
3	Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty.	Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015	<p>1. Bagaimana gambarkan latar belakang netralitas PNS dari sudut pandang teori-teori birokrasi dikaitkan dengan pilkada serentak 2015?</p> <p>2. Bagaimana sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran?</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Dalam penelitian ini di peroleh dari literatur-literatur serta artikel yang berhubungan dengan penelitian.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Netralitas merupakan hal yang mutlak bagi seorang PNS, Budaya tawar-menawar jabatan, yang di tentukan berdasarkan kedekatan dan suka-tidak suka, memungkinkan semakin jauhnya PNS dari sikap netral. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan Surat Edaran NomorB/2335/M.PANRB/07/2015 tertanggal 22 Juli 2015, yang mengimbau agar seluruh PNS netral dalam Pilkada. Sanksi yang diberikan adalah</p>

²¹Dida Daniarsyah, Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume V No. 2 / Desember 2015), h.1.

					pencopotan jabatan bila kemudian terbukti memanfaatkan fasilitas-fasilitas Negara dan dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang banyak. ²²
4	Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona.	Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	1. Bagaimana eksistensi dan esensi asas Netralitas ?	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis mendalam	Hasil penelitian ini menunjukkan Problematika netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu terjadi ketika makna netralitas belum memiliki standar dan kriteria yang jelas. Secara substansial, fokus UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menjadikan PNS sebagai obyek netralitas, terlepas dari dinamisasi kegiatan politik praktis yang sarat intervensi. Perlu digarisbawahi bahwa peran PNS dalam pemerintahan selalu berkorelasi dengan banyak pihak yang berkepentingan. Jika netralitas tidak diimbangi oleh kriteria dan standar pembatasan, maka sangat dimungkinkan asas netralitas hanya menjadi slogan yang minim implementasi. ²³
5	Rizki Muharlin Rayadi dan	Politisasi Birokrasi Pada	1. Mengapa terjadi politisasi	Penelitian ini adalah metode penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pemilukada Siak pada tahun

²²Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda Sosiawaty, dan Sosiawaty, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015*, (Makaasar: De La Macca, 2015), h.5.

²³Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (*Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 9 Februari 2016), h.1.

	Drs. Erman M, M.Si.	Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)	birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2011? 2. Apa dampak dari politisasi birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2011 terhadap birokrasi dan pemerintah	kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara	2011, telah terjadi politisasi birokrasi dalam bentuk mobilisasi Pegawai Negeri Sipil sebagai mesin politik yang digunakan oleh calon kepala daerah yang akan bersaing dengan Jenderal. Pemilihan dengan akses terhadap kekuatan birokrasi. Politik birokrasi sebagai alat atau alat untuk mengumpulkan dukungan politik bagi calon calon untuk merebut kekuasaan, pastinya telah merusak semangat pemilihan umum yang bebas dan adil dalam prinsip demokrasi yang terkandung. ²⁴
--	---------------------	---	---	---	--

Setelah dilakukan tinjauan dari beberapa referensi, tidak ditemukan bentuk penelitian yang menandakan bahwa penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada adalah penelitian yang sama, jadi dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Menjadikan pembeda penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus kepada mobilisasi yang dilakukan Partai Golkar terhadap aparatur sipil negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar.

²⁴Rizki Muharlin Rayadi dan Drs. Erman M, Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011), (*Jurnal Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 1, No 1, 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Teori*

Untuk analisis lebih mendalam dalam penelitian ini, maka diperlukan teori yang mendukung sebagai berikut :

1. *Mobilisasi Politik*

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua actor, individu dan Partai. Konsep aktivitas Mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi affectif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel *directional* diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara Partai dan Individu.²⁵

Dalam menjalankan mobilisasi, sebuah partai politik mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya.²⁶ Di dalam melakukan mobilisasi, partai atau kandidat juga dapat memanfaatkan figur. Hal ini tentunya dengan melihat kualitas figur yang coba ditampilkan, sehingga pemilih mampu menerimanya sebagai nilai politik yang akan dipilih. Kualitas dari seorang figur

²⁵George Towar Ikkal Tawakkal, Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009, (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009), h.29.

²⁶Firmansyah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007), h. 6-21.

dapat dilihat dari tiga dimensi: kualitas instrumental, faktor simbolis, dan fenotipe optis.²⁷

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki partai politik. Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik. Perbedaan kategori antara mobilisasi langsung dan tidak langsung berdasar pada mekanisme-mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung maupun melalui media-media.²⁸

Teori mobilisasi politik yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini dimana Mobilisasi Politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga Negara diarahkan pada keterlibatan politik, tetapi bagaimana menjalankan mobilisasi politik yang dilakukan partai politik untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Partai politik dan rezim yang berkuasa berlomba memanfaatkan mobilisasi untuk strategi kampanye baik untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan

²⁷Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004), h. 207.

²⁸George Towar Ikbil Tawakkal, *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009*, (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2009), h.45

dukungan politik dalam pemilihan umum maupun untuk memelihara citra mereka di mata masyarakat. Hegemoni dari rezim berkuasa menempatkan Partai Golkar dalam tubuh birokrasi untuk keinginan memperkuat pilar-pilar kekuasaannya, Mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat kuat dirasakan oleh para Pegawai pemerintah. memobilisasi ASN untuk hadir dalam acara kepartain tersebut, merupakan contoh mobilisasi politik. Mobilisasi politik terhadap ASN justru menunjukkan adanya krisis pelebagaan dalam hal pemanfaatan Aparatur Negara. Realitas menunjukkan dalam beberapa kegiatan Partai Golkar yang berlangsung, marak terjadi politisasi birokrasi seperti dalam Rapimda Golkar, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu dengan teori mobilisasi politik diatas penulis dapat menganalisis bentuk mobilisasi politik terhadap aparatur sipil negara dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016.

2. Teori Kekuasaan

Apabila Negara di pahami sebagai suatu manifestasi kehendak umum dengan berbagai kelembagaannya seperti pemerintah (eksekutif,legeslatif dan yudikatif), maka obyek pembahasan ilmu politik berikutnya selalu aktual yakni mengenai kekuasaan. Konsep kekuasaan mempunyai sifat yang mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya. Sebagian kalangan mengidentikan bahwa politik (*politics*) adalah kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dapat dimaknai pula dalam dimensi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan relasi sosial seperti yang dinyatakan sosiolog oleh Talcott Parsons, ia menyatakan sebagai kemampuan pada umumnya untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam

hubungan sosial, terpisah dari alat yang digunakan atau status “pemberian wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan kebijakan.²⁹

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural Talcoot Parsons. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.³⁰

Bahkan menurut Amitai Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. Kekuasaan bisa ada di mana-mana, bisa tentang apa saja meski kekuasaan tidak dapat dengan mudah diperoleh tetapi kekuasaan akan menjadi suatu hal yang bisa dimiliki oleh siapa saja atas orang lain demi kelangsungan hidupnya.³¹

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang

²⁹ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik*, (Makassar: PT. Gramasurya. 2015), h.37.

³⁰ Santoso P. B. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.85.

³¹ Shalikhatin Pawestri, Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel *Bibir Merah* Karya Achmad Munif, (*Skripsi*, Program Studi Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 2015), h.19.

sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.³²

Teori kekuasaan yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini bagaimana Kekuasaan bisa ada di mana-mana, bisa tentang apa saja meski kekuasaan tidak dapat dengan mudah diperoleh tetapi kekuasaan akan menjadi suatu hal yang bisa dimiliki oleh siapa saja atas orang lain demi kelangsungan hidupnya. Kekuasaan memunculkan berbagai kekuatan, seperti halnya yang terjadi dalam mobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan Partai Golkar, kekuasaan rezim yang berkuasa dan Partai Golkar masing-masing memiliki kekuatan untuk memobilisasi tersebut, Talcott Parsons, ia menyatakan sebagai kemampuan pada umumnya untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam hubungan sosial, terpisah dari alat yang digunakan atau status “pemberian wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan kebijakan. Dalam penelitian ini bagaimana rezim yang berkuasa memiliki kuasa sebagai kekuatan untuk membuat keputusan karena itu dengan teori kekuasaan di atas kita bisa melihat bagaimana bentuk kekuasaan yang dilakukan pada saat memobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan Partai Golkar Tahun 2016..

3. Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata “*bureau*” yang berarti meja atau kantor; dan kata “*kratia*” (*cratein*) yang berarti pemerintah. Jadi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau

³²Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31.

diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi.³³

Terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik adalah sebagai berikut :

- a. berarti Organisasi yang rasional (*rational organization*)
- b. berarti Ketidakefisienan organisasi (*organizational inefficiency*)
- c. berarti Pemerintahan oleh para pejabat (*rule by official*)
- d. berarti Administrasi negara (*public administration*)
- e. Administrasi oleh para pejabat (*administration by official*)
- f. Bentuk organisasi dengan ciri tertentu, yaitu adanya hirarki dan peraturan
- g. Salah satu ciri dari masyarakat modern yang mutlak (an essential quality of modern society).³⁴

Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang tersetruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis dan dijalankan oleh bagian tertentu dan terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahliannya dibidangnya.³⁵

Dengan demikian birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka dalam mengatur kehidupan negara. Dalam paham tradisional Jawa misalnya,

³³Moch. Jasin, *Birokrasi Zero Korupsi*, (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, 2013), Hal.1.

³⁴Rina Martini, *Birokrasi Dan Politik*, (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012), h.8.

³⁵Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2011), h.59.

aparatur birokrasi (punggawa kerajaan) disebut sebagai *abdi dalem ingkang sinuwun* (abdi raja). Sehingga aparatur birokrasi memiliki tugas untuk “mengejawantahkan/ melaksanakan” titah kekuasaan raja yang diberikan oleh Tuhan (Jawa: *Sang Hyang Dumadi*) sehingga mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja, dan bukan kepada rakyat.³⁶

Dalam deskripsi ideal, seluruh aparatus birokrasi/ pemerintah adalah alat yang dimainkan oleh pemiliknya, yaitu rezim kekuasaan politik suatu negara (rezim penguasa). Selain itu, fakta absennya kepemilikan sarana kekuasaan ini juga memberikan pengaruh. Karena sumber penghidupannya tergantung pada jabatannya, birokrat menjadi takut untuk kehilangan jabatan dan pekerjaannya.³⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pegawai” diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, sehingga pegawai negeri dapat diartikan orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan:

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³⁹

³⁶Rina Martini, *Birokrasi Dan Politik*. (Semarang: Upt Undip Press. 2012), h.25.

³⁷Moch. Jasin, *Birokrasi Zero Korupsi*. (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. 2013), h.38.

³⁸Muhammad Halwan Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar*, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h.36.

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Melihat undang-undang lain yang berlaku, terdapat pengertian pegawai negeri sipil yang agak berbeda dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian, seperti di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pengertian pegawai negeri sipil menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.⁴⁰

Berbicara mengenai netralitas tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang diperhadapkan kepadanya. Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau kelompok tertentu.

Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak

⁴⁰Faisal Abdullah .*Hukum Kepegawaian Indonesia*..(Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), h 2.

bergeser sedikit pun walau masternya berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik.⁴¹

Penjabaran teori birokrasi tersebut diatas, peneliti menyesuaikan konsep birokrasi dengan kebutuhan penelitian yang dianggap penulis bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk penelitian ini. Faktor pengaruh ketidaknetralan pegawai birokrasi berkaitan dengan penelitian ini, netralitas birokrasi atau netralitas aparatur sipil negara pada aktivitas politik khusus pada kegiatan Partai Golkar. Aparatur sipil negara merupakan pegawai yang menjalankan birokrasi tersebut.

4. Partai Politik

Kehadiran partai politik dalam suatu negara yang demokratis merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi politik masyarakat serta akan diharapkan menjadi pengendali pemerintah dalam mengelola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Partai Politik Menurut Inu Kencana "Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) Negara". Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi

⁴¹PatriaA, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, (*Jurnal*,: Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2015), h.21.

oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat sebagai politik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang dalam membicarakan partai politik sebagai pengendali kekuasaan.⁴²

Menurut Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan partai.⁴³

Carl J. Friedrich : Partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materil.⁴⁴

Secara umum, Riswandha Iman mengemukakan bahwa pada dasarnya definisi-definisi mengenai partai politik memiliki kesamaan ciri, yakni : *pertama*, kumpulan orang-orang se ide dan berupaya mewujudkan ide-ide tersebut. *Kedua*, memiliki organisasi yang rapi, yang memiliki kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. *Ketiga*, berupaya menyusun agenda kebijakan, serta berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan atas agenda tersebut. *Keempat*, berambisi

⁴²Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013), h.104.

⁴³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet.IV; Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010), h.11.

⁴⁴Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 214.

menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran pemerintahan untuk mewujudkan ide-idenya.⁴⁵

Giovanni Sartori : Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan, melalui pemilu itu, mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik.⁴⁶

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan Negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi secara teori dan apapun namanya suatu organisasi politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.⁴⁷ Berikut uraian fungsi partai politik antara lain :

a) Sebagai Sarana Komunikasi

Partai politik berfungsi memperbivangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan

⁴⁵Ratnawati, *Sistem Kepartaian di Era Transisi*, (Fisipol UGM. 2006), h.2.

⁴⁶Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta. 2012) h. 215

⁴⁷Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008), h.156.

pemerintah peruh di perjeas kepada semua kelompok masyarakat , dan pihak lain pemerintahn harus tanggap terhdap tuntutan maysarakat.

b) Sebagai Saran Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik adalah sebagai proses yang melaluinya mesyarkat menyampaikan “budaya politi” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya/ dengan demikian sosialisasi politik mmerupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa.

c) Sebagai saran Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Rekrutmen politik menjamin kontiunitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Adan berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaiut melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

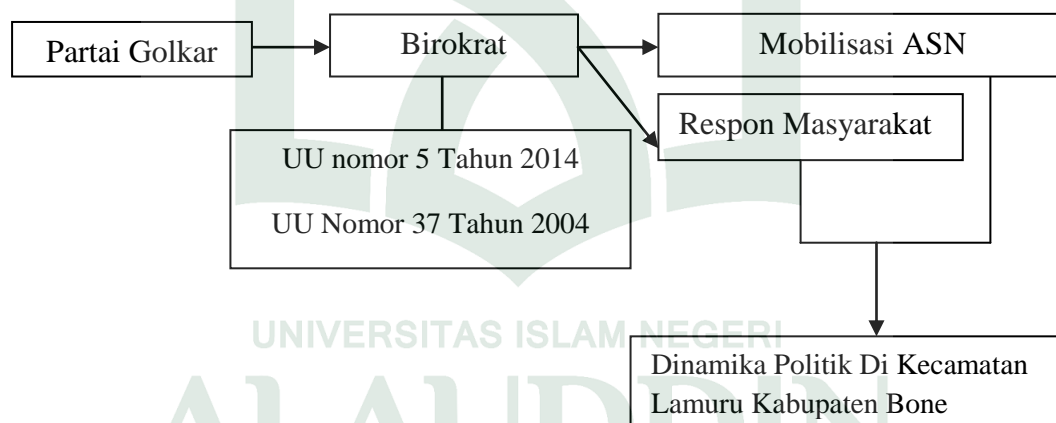
d) Saran Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu

mengatasinya, atau sekurang-kuangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat di tekan sememinil mungkin.⁴⁸

Teori yang ada di atas sangat terkait dengan penelitian ini bagaimana partai politik sebuah organisasi politik yang bertujuan menguasai pemerintahan, serta mengendalikan masyarakat dengan cara merebut perhatian rakyat melalui persaingan dan kepentingan politik. Partai politik merupakan perantara yang besar berhubungan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Oleh kaena itu, teori partai politik diatas digunakan untuk menganalisis peran partai politik dalam mobilisasi aparatur sipil Negara.

B. *Kerangka Konseptual*



Keterangan :

Adanya pengaruh yang besar Partai Golkar terhadap Bupati, dimana pengaruh tersebut dapat dipergunakan sebagai bentuk mobilisasi politik oleh Partai Golkar sekaligus dapat menjadikan birokrasi sebagai instrument atau alat politik yang berguna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintah. Di birokrasi telah di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

⁴⁸Miriam Budiardjo,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), h.405-409.

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas menyatakan: Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁴⁹ Dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi anggota Partai Politik yang menyatakan sanksi bagi PNS yang terlibat aktif dalam kegiatan politik adalah pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sementara bagi ASN yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, dapat dilakukan asalkan ia mengundurkan diri sebagai ASN.⁵⁰ UU tersebut telah menjelaskan bagaimana seharusnya ASN maupun birokrasi harus bersikap netral bebas dari intervensi, dan politisasi dari partai politik.

Akan tetapi Kekuasaan yang besar inilah yang menyebabkan intervensi politik terhadap birokrat yang melahirkan mobilisasi ASN dalam kegiatan Partai Golkar, proses mobilisasi ASN inilah membentuk 2 kategori mobilisasi, mobilisasi secara langsung dan tidak secara langsung kepada ASN untuk hadir ataupun terlibat dalam kegiatan Partai Golkar. Keterlibatan birokrat dalam kegiatan Partai Golkar memunculkan respon masyarakat ya. Dari kedua subjek ini, mobilisasi dan respon masyarakat inilah menjadikan dinamika politik di Kecamatan Lamuru, yang di sisi mobilisasi ASN bertujuan untuk kepentingan penguasa dan disisi lainya respon masyarakat melihat bahwa kurangnya

⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

kepentingan terhadap rakyat sesuai dengan tugas birokrat yang bisa terfokus untuk kepentingan politik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ini sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripsi analitik. Deskripsi analitik adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat.⁵²

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Birokrat dan Aktivitas Politik terkait mobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan partai Golkar.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini di Mulai tanggal 21 Juni-21 Agustus tahun 2017, dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Peneliti mengambil beberapa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di instansi/kantor jabatan dinas di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan pertimbangan bahwa Aparatur Sipil Negara yang yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang diteliti.

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.1.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.7.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang di teliti.⁵³

D. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek yang di teliti dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu aparatur sipil negara dan masyarakat Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang mengetahui mengenai Birokrat dalam aktivitas politik.

b. Obyek Penelitian

Obyek dari pelaksanaan penelitian ini adalah mobilisasi aparatur sipil negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam setiap kegiatan Partai Golkar Tahun 2016.

E. Jenis Data

1. Data Primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.⁵⁴ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabet, 2014).h.7.

⁵⁴Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Kuminikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), H.29.

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan yang diteliti.⁵⁵

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang tersedia.⁵⁶

F. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Library research* yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁷
- b. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni wawancara dan observasi:
 - a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta di bantu

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung:Alfabet,2014), h.218-219.

⁵⁶Syamsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method*., (Makassar: Wade Group. 2015), h.72.

⁵⁷Burhan bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009), h.108

dengan panca indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter dan data lainnya yang relevan.⁵⁹

c. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶⁰

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara digunakan oleh penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁶¹

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di antaranya yaitu :

⁵⁸Burhan Bungin, *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h.118.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.222.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.231.

⁶¹Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h.173.

Tabel 1.

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	M	Pegawai Negeri Sipil	54 Tahun
2	S	Pegawai Negeri Sipil	43 Tahun
3	Usman.HT	Petani (Imam Masjid)	60 Tahun
4	A	Pegawai Negeri Sipil	58 Tahun
5	H.Najamuddin	Petani	68 Tahun
6	Asri	Petani	27 Tahun
7	R	Pegawai Negeri Sipil	50 Tahun
8	Masjaya	Wiraswasta	37 Tahun
9	A.Adil	Wisraswasa	29 Tahun
10	Muh Idris	Petani	42 Tahun

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶²

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.222.

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶³

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dukemukakan, semakin lama peneliti ke lapanga, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.⁶⁴ Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dala bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan men-display-

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.245.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.247.

kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁵

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut mile dan huberan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁶⁶



⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.249.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian tepatnya di Kecamatan Lamuru Kab Bone, penelitian ini membahas gambaran umum lokasi penelitian, disini menjelaskan kondisi geografis Kecamatan Lamuru, penduduk masyarakat Kecamatan Lamuru sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Lamuru, selain itu juga membahas gambaran umum DPD II Partai Golkar, serta jumlah Aparatur Sipil Negara di setiap instansi/kantor jabatan dinas. Pada bab ini juga akan menjelaskan hasil dari penelitian ini, menjawab dari apa yang menjadi rumusan masalah pada bab sebelumnya.

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Lamuru yang dimaksud dalam tulisan ini ialah sebuah kecamatan dalam daerah hukum Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya kurang lebih 130 km dari kotamadya Ujung pandang arah ke Kabupaten Soppeng lewat poros Camba.

Pemberian nama Lamuru dari segi Etimologi, yaitu dari kata bugis NAURUNG, arti dari kata Naurung, yang melingkungi atau dikepung, pengertian yang bersifat kongkrit, tetapi hanya bersifat abstrak, yaitu bukan dalam pengertian geografis tetapi lebih bersifat historis serta kekeluargaan. Adapun daerah-daerah dianggap melingkungi dan mempunyai hubungan historis dan kekeluargaan dengan Lamuru yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Sawito, dan Sidenreng. Kata-kata

Naurung ini, kemudian banyak mengalami evolusi dalam pengucapan sehingga menjadi Lamuru.⁶⁷

1. *Kecamatan Lamuru*

Kecamatan Lamuru merupakan salah satu kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang berjarak \pm 62,5 km dari ibukota Kabupaten Bone. Secara geografis, Kecamatan Lamuru berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bengo
- Sebelah barat berbatasan dengan Tellu Limpoe
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lappariaja.⁶⁸

Luas wilayah Kecamatan Lamuru adalah 208 km² atau sekitar 4,56 persen dari luas Kabupaten Bone. Kecamatan Lamuru terbagi menjadi 11 desa dan 1 kelurahan. Desa terluas adalah Desa Mamminasae dan yang terkecil adalah Desa Poleonro dan Sengeng Palie. Ibukota Kecamatan Lamuru adalah Kelurahan Lalebata. Desa dengan jarak terdekat dari ibukota kecamatan adalah Desa Poleonro dan Sengeng Palie (2,5 km), sedangkan desa terjauh adalah Desa Barugae (35 km).⁶⁹

Topografi wilayah Kecamatan Lamuru adalah dataran dan terdapat satu desa yang berbukit-bukit yaitu Desa Massenreng Pulu. Ketinggian wilayah Kecamatan Lamuru berkisar antara 110 hingga 244 meter di atas permukaan air laut.

⁶⁷ Abd.muttalib M. *Lamuru selayang Pandang*. (Makassar): 1978), h.4.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

⁶⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

Kecamatan Lamuru terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan yang terbagi atas 32 dusu dan 2 Lingkungan. Dusun/Lingkungan ini membawahi 69 RW dan 146 RT yang menyebar di wilayah Kecamatan Lamuru. Banyaknya pengawai yang bekerja di instansi/kantor pemerintahan di wilayah Kecamatan Lamuru sebanyak 74 orang yang tersebar dalam 11 instansi.⁷⁰

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kecamatan Lamuru tercatat 24.878 jiwa yang terdiri dari 11.593 laki-laki dan 13.285 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tumbuh 0,39 persen dibanding tahun 2014 yang berjumlah 24.780 jiwa. Dengan luas wilayah 208 km², maka kepadatan penduduk setia km² adalah 119,61 pada tahun 2015.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini juga dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2015, nilai sex ratio Kecamatan Lamuru sebesar 87,26 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 87 penduduk laki-laki.

Statistik Kependudukan Kecamatan Lamuru Tahun 2016

Tabel 2.

Kode	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
012	Turu Cinnae	1332	1539	2871
013	Mamminasae	917	1048	1965
014	Mattampa Bulu	1526	1654	3180
015	Massenrengpulu	1140	1292	2432

⁷⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

016	Mattampawalie	988	1215	2203
017	Poleonro	824	946	1770
018	Lalebata	805	956	1761
019	Sengeng Palie	1083	1235	2318
020	Padaelo	672	745	1417
021	Seberang	619	732	1351
022	Barugae	751	861	1612
023	Barakkae	936	1062	1998
Jumlah		11.593	13.285	24.878

Sumber : Kecamatan Lamuru Dalam angka 2016

Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Lamuru pada tahun 2015 adalah 5.618 rumah tangga. Dengan demikian rata-rata anggota rumah tangga dalam setiap rumah tangga adalah 5,16 orang.⁷¹

Pendidikan merupakan salah satu modal utama pendukung kemajuan suatu bangsa. Ini tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan yang baik tentunya dapat memperlancar proses pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan yang baik pula. Sampai tahun 2015, di Kecamatan Lamuru terdapat, 28 SD/MIS Sederajat, 10 SMP/MTS sederajat serta 5 buah sekolah setingkat SMA/MA Sederajat. Pada tahun 2015, jumlah murid Sd tercatat sebanyak 2.928 orang dan merupakan jumlah tersebar dibanding jenjang-jenjang pendidikan setelahnya.⁷²

⁷¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

⁷² Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

Jumlah saran kesehatan di Kecamatan Lamuru pada tahun 2015 adalah 1 unit Puskesmas, 4 unit Puskesmas Pembantu, dan 26 unit Posyandu. Untuk tenaga kesehatan, terdapat 1 orang dokter umum, 5 orang perawat, dan 12 orang bidan desa. Kecamatan Lamuru telah memiliki beberapa sarana dan prasarana kesehatan. Namun demikian, untuk mendapat pelayanan rawat inap, masyarakat Kecamatan Lamuru banyak berobat ke Watansoppeng karena di Puskesmas Kecamatan Lamuru belum ada pelayanan rawat inap, sedangkan akses jarak menuju kota Watansoppeng lebih dekat dibanding menuju Kota Watampone.⁷³

2. Gambaran Umum DPD II Golkar Bone

Sejarah berdirinya Golkar Bone tentu tidak terlepas dari Sejarah Kelahiran Sekber Golkar. Terbentuknya Sekber Golkar tidak terlepas pula dari Sejarah Kepartaian di Indonesia. Golkar pasca munaslub 1998 adalah Golkar dengan etos dan visi baru. Golkar dengan etos reformasi dan yang memandang demokrasi sebagai suatu keniscayaan. Golkar 'baru' ini karena didorong oleh bertemunya dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal, sesuai dan sejalan dengan Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya, yang mengatakan bahwa jati diri Golkar adalah sebagai kekuatan pembaru. Dengan demikian, etos pembaruan sejatinya merupakan sesuatu yang *inherent* dan *built in* dalam tubuh Golkar.

Berdasarkan perspektif ini, ke depannya Golkar akan tetap memiliki komitmen dan bersikap konsisten terhadap ikrar tersebut, dengan senantiasa tetap mengaktualisasikan kepeloporan untuk pembaruan dan pembangunan sesuai dinamika zaman. Pembaruan Golkar sekarang ini tidak lain merupakan

⁷³ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

implementasi dari ikrar tersebut. Sedangkan secara eksternal, lahirnya golkar dengan visi baru yang nantinya bernama Partai Golkar tidak lepas dari keberhasilan gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 yang ditandai oleh terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Buah dari gerakan informasi ini adalah dilakukannya reformasi di segala bidang, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum.⁷⁴

Adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964 (yang kemudian diperingati sebagai Hari lahir Golkar dan Partai Golkar).

Pada mulanya Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional, berkembang menjadi 97 federasi/perhimpunan organ non-afiliatif (baik yang bersifat keagamaan maupun non-keagamaan) hingga akhirnya menjadi 291 organisasi. Banyaknya jumlah anggota tersebut dimotivasi oleh kepentingan bersama di dalam menghadapi Komunis dan mempertahankan ideology Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran Sekber Golkar sebagai cikal bakal Golkar dan Partai Golkar, merupakan : Wadah bagi organisasi-organisasi yang anti-komunis dalam rangka membela, mengamankan, dan mempertahankan ideology Pancasila. Sebagai kekuatan pembaru yang dapat menjadi alternative yang berbeda dengan partai-partai politik yang bertumpu pada “ideology aliran”.

⁷⁴Akbar Tandjung. *Menuju Kelahiran Partai Golkar: Pokok-pokok Paradigma Baru*. (Jakarta: DPP Partai Golkar, 1998), hal 23.

Bertemunya dorongan internal dan tuntutan eksternal inilah yang meniscayakan tampilnya sebuah golkar visi baru dengan nama Partai Golkar. Dengan visi baru dengan semangat reformasi ini, golkar sama sekali bukan hanya sekedar ingin menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi sehingga terkesan defensif, juga bukan sekedar ingin merealisasikan pemutusan hubungan dengan masa lalu, melainkan karena golkar bertekad ingin menyertai serta mengarahkan jalannya reformasi, sehingga berlangsung dalam koridor knstitusi dan tidak salah arah. Golkar memandang bahwa reformasi di segala bidang itu harus merupakan proses evaluasi yang dipercepat, yakni secara gradual, terarah, dan konstitusional.⁷⁵

Pemrakarsa terbentuknya Golongan Karya di Kabupaten Bone, sekaligus sebagai Pengurus Golkar periode I, dengan komposisi sebagai berikut:

- Ketua : H. A. Sebbu
Wakil Ketua : A. Baso Samad
Wakil Ketua : H. Djunaid Sulaeman
Sekretaris : Sutoto Danandjaya K
Wakil Sekretaris : H. Abd. Rahman
- Periode I (1971-1978)
K e t u a : H. Andi Sebbu
Sekretaris : Sutoto Danandjaya K.
- Periode I (1978-1983)
K e t u a : Andi Dadi
Sekretaris : Andi Page
Bendahara : Dra. Rosdiana Hasyim

⁷⁵https://sulsel.partaigolkar.or.id/sejarah_dpd

- Periode I (1983-1988)
K e t u a : H. Andi Pattikkeng
Sekretaris : H. Andi Muh. Idris Galigo
Bendahara : Drs. H. Andi Kafrawi R.
- Periode I (1988-1993)
K e t u a : H. Andi Bachtiar
Sekretaris : H. Andi Muh. Idris Galigo
Bendahara : Drs. H. Saggaf Saleh
- Periode I (1993-1998)
K e t u a : H. Andi Haruni
Sekretaris : Ir. H. Andi Lantara Pawiseang
Bendahara : H. Andi Mappaseling, BA
- Periode I (1998-2004)
K e t u a : H. Andi Muh. Idris Galigo
Sekretaris : Drs. H. Ambo Dalle
Bendahara : H. Andi Mappaseling, BA
- Periode I (2004-2009)
K e t u a : H. Andi Muh. Idris Galigo, SH
Sekretaris : Drs. H. Ambo Dalle, MM
Bendahara : Ir. H. Ifrayim Sunusi
- Periode I (2009-2015)
K e t u a : H. Andi Muh. Idris Galigo, SH
Sekretaris : Firman Batari, SH, MH
Bendahara : Ir. H. Ifrayim Sunusi
- Periode I (2013-2017)
Ketua : Dr. H. A. Fashar M. Padjalangi

Sekretaris : Drs. Andi Akbar Yahya, MM

Bendahara : Hj. Mintayu Syamsuddin, SE, M.Si.⁷⁶

3. *Pengawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Kecamatan Lamuru*

Berdasarkan data yang diperoleh data sekunder Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkup Pemerintah Kecamatan Lamuru, banyaknya pegawai yang bekerja terdapat 74 Aparatur Sipil Negara dari instansi/kantor jabatan dinas. Dari keseluruhan pegawai tersebut, sekitar 70 persen berjenis kelamin laki-laki.⁷⁷ Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.

Instansi/Kantor Jabatan Dinas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kantor camat	7	4	11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	5	2	7
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	2	2	4
Puskesmas	2	9	11
Dinas Peternakan	1	-	1
BKKBN	1	2	3
Komando Roayon Militer	13		13
Polisi Sektor	17	-	17
Kantor Agama	2	3	5
Kantor Sosial	-	-	-

⁷⁶ Kantor Partai Golkar Kabupaten Bone, pada hari Selasa, 21 Juli 2017

⁷⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Lamuru dalam angka Tahun 2016

Statistik	1	-	1
Jupen	-	-	-
Kehutanan Dan Perkebunan	1	-	1
Jumlah/Total	52	22	74

Sumber : Kecamatan Lamuru dalam angka 2016

B. *Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Partai Golkar di Kecamatan Lamuru*

Terkait dengan keberadaan pegawai negeri, sejarah telah mencatat bahwa sejak awal kemerdekaan, kabinet, parlemen dan partai-partai politik senantiasa berupaya menanamkan pengaruhnya kepada pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah. Selanjutnya, fenomena ini terus berlangsung dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai pemerintahan Reformasi saat ini. Dalam perkembangannya itu, netralitas pegawai negeri, khususnya Aparatur Sipil Negara, bercampuraduk dengan kepentingan politis yang melingkupinya.

Alasan mengapa birokrasi sangat kuat secara politis, selain karena kepemilikannya atas sumber-sumber kekuasaan, kedua adalah karena peran dan fungsi birokrasi yang sangat spesifik. Peran dan fungsi ini tidak dapat diperankan oleh lembaga atau kelompok sosial lainnya, sehingga praktis birokrasi menjadi institusi yang paling berkuasa. Birokrasi setidaknya memiliki 4 (empat) tugas/peranan dalam penyelenggaraan negara yakni 1) Peran dalam proses input;

2) Peran dalam proses legislatif; 3) Peran sebagai perterjemah (*interpreter*) kebijakan politik, dan 4) Peran sebagai pelaksana (*eksekutor*) kebijakan politik.⁷⁸

Kegiatan untuk mempengaruhi proses politik, ada yang di laksanakan atas kesadaran dan prakarsa sendiri (otonom) dan apa pula yang dilakukan atasan dasar desakan, imbauan dan paksaan dari pihak lain (dimobilisasi). Misalnya partisipasi politik mobilisasi pada masa orde baru di mana partisipasi politik justru dikondisikan dalam keadaan mengambang, artinya rakyat dalam memberika suaranya dalam setiap kali pemilu hanya dimobilisasi tanpa mengetahui orientasi politik yang hendak meraka usung dalam sistem politik. Partisipasi dalam bentuk mobilisasi menurut hemat penulis terkategoriakan sebagai partisipasi politik tidak sadar bukan partisipasi secara otonom. Alasannya adalah bahwa ciri utama kegiatan yang dilaksanakan secara otonom adalah *self metion*, artinya aktivitas itu muncul sendiri dari orang yang bersangkutan. Ciri utama mobilisasi adalah bahwa yang melakukan kegiatan itu digerakkan oleh pihak lain.⁷⁹

Kemampuan inilah sehingga Aparatur Sipil Negara mampu di mobilisasi karena kekuasaan Bupati berhubungan langsung dengan Partai Golkar sehingga melahirkan kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Sesuai dengan hasil penelitian, ada beberapa bentuk mobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar tahun 2016 diantaranya ialah :

⁷⁸Rina Martini. *Birokrasi Dan Politik*. (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012).h.105

⁷⁹Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Grup, 2013), h.140.

1. *Mobilisasi Secara Langsung*

Partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang mejadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengerahan ketat dari monopoli partai politik.⁸⁰

Betapapun juga, penting untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivitas politik, dan melihat apakah terdapat semacam hubungan hierarkis antara peristiwa-peristiwa tadi. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal.⁸¹

Berangkat dari realitas politik yang empiris. Artinya, adanya suatu kenyataan bahwa aktivitas politik warga negara sukar dibedakan mana yang dikategorikan tindakan otonom atau dimobilisasi. Artinya, antara kedua-duanya sulit untuk dibedakan. Berangkat dari pemikiran inilah, maka semua kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses politik di dalam sistem pemerintahan terlepas apakah tindakan itu bersifat otonom atau kendali (memobilisasi) tetap dikategorikan sebagai partisipasi politik.⁸²

⁸⁰Miriam Budiardjo,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), h.379.

⁸¹Michael Rush, Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta;PT RajaGrafindo Persada, 2003),h.123.

⁸²Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Grup, 2013), h.141.

Hal ini boleh jadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Namun tidak jarang juga berpartisipasi yang dilakukan bukan karena kehendak individu yang bersangkutan, akan tetapi karena diminta atau digerakkan oleh orang lain dan bahkan dipaksa oleh kelompoknya. Partisipasi yang terakhir ini adalah partisipasi yang digerakkan atau sering disebut dengan *mobilized political participation*.⁸³

Hal ini menyisakan sebuah tugas riset mobilisasi untuk menyelidiki pernyataan bahwa hubungan hirarkis yang dilembagakan antara Partai dan individu sedang melemah sebagai sebuah hasil dari terus meningkatnya orientasi aktor ke dalam diri mereka ketika sadar akan artikulasi kepentingan, pengembangan loyalitas, dan pemanfaatan instrumen-instrumen mobilisasi.

Mobilisasi terkadang dianggap sebagai sebuah kondisi awal dari evolusi menuju Partisipasi Politik. Partisipasi Politik dianggap sebagai kondisi ideal dalam sebuah iklim demokrasi yang baik. Manifestasi lain dari mobilisasi politik adalah orientasi partai-partai politik yang lebih terfokus pada pemilihan pejabat-pejabat dan perebutan kekuasaan atas jabatan-jabatan tertentu daripada memperkuat basis ideologi anggota partai politik.⁸⁴

Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan

⁸³Afan Gaffar, “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, Dalam Syarofin Arba (Editor), *Demotologi Politik Indonesia: Mengusung Elitism Dalam Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h.241.

⁸⁴<http://www.anakadam.com/2016/08/teori-politik-mobilisasi/>

memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Mobilisasi langsung, semisal adalah menggerakkan simpatisan partai untuk melakukan konvoi jalanan, untuk melakukan aksi-aksi politik, dan lain sebagainya.⁸⁵

a. Kewajiban ASN Hadir Di Acara Partai Golkar

Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, sedangkan wewenang adalah bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi. Jadi, rakyat atau seorang bawahan harus mematuhi perintah penguasa atau pihak yang berkuasa karena posisi penguasa atau pimpinan tersebut telah memberikan wewenang untuk memerintah secara sah.⁸⁶

Perintah (instruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinal) untuk dilaksanakan. Instruksi politik biasanya berlangsung pada institusi yang berkaitan dengan aspek politik dari kehidupan seperti negara dan partai politik.⁸⁷

Kekuasaan Bupati yang secara sah kepada Birokrasi ataupun bawahannya relative menjadi instrument politis atau alat untuk mencapai kekuasaan yaitu

⁸⁵George Towar Ikbal Tawakkal, Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009, (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2009), h.45.

⁸⁶Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Group, 2013), h.14.

⁸⁷Damsar. *Pengantar sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Group, 2010), h.168.

mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaannya dan akhirnya peran Bupati Bone dalam memanfaatkan memobilisasi aparatur sipil negara dalam kegiatan rapimda Partai Golkar Tahun 2016 sangat berpengaruh dikalangan aparatur sipil negara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai negeri sipil di Kecamatan Lamuru, M mengatakan :

“Sebagai Pegawai Negeri Sipil Ya, tidak bisa terlibat dalam kegiatan rapimda partai Golkar akan tetapi Pak Bupati selaku atasan saya dan Pak Bupati adalah ketua DPD II Partai Golkar jadi apa yang di sampaikan oleh Pak Bupati maupun itu kegiatan kepartaian kalau beliau yang meminta ya, saya selaku bawahan pasti ikut dalam kegiatan itu karna beliau adalah atasan saya.”⁸⁸

Jelas bahwa dari hasil wawancara diatas, pengaruh kekuasaan Jabatan seorang Bupati mampu melakukan berbagai kepentingan pribadi untuk memperkuat kekuasaannya baik itu memobilisasi pegawai negeri sipil kegiatan Rapimda Partai Golkar, Penyalahgunaan kekuasaan seorang Bupati seakan menjadi kewajiban kepada bawahan hadir dalam kegiatan rapimda Partai Golkar tahun 2016. ini menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama dari sebuah mobilisasi Aparatur Sipil Negara dilingkup pemerintahan Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Lamuru hanyalah sebuah kewajiban.

Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun partai politik. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota organisasi terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan.

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan M, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:54 Tahun, Pada Hari Sabtu, 24 Juni 2017

Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel *directional* diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara Partai dan Individu.⁸⁹ Dalam menjalankan mobilisasi, sebuah partai politik mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Di dalam melakukan mobilisasi, partai atau kandidat juga dapat memanfaatkan figur. Hal ini tentunya dengan melihat kualitas figur yang coba ditampilkan, sehingga pemilih mampu menerimanya sebagai nilai politik yang akan dipilih.⁹⁰

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di mobilisasi untuk menghadiri serangkaian acara pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Sulsel yang akan digelar di Bone, pada Jumat 21 dan Sabtu 21 Oktober 2016. Mobilisasi ASN untuk menghadiri kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan HUT Golkar ke-52 tahun ini diperkuat dengan adanya pengakuan sejumlah ASN dan tenaga Honorer yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, dimana mereka diinstruksikan alias wajib hadir dalam acara yang akan dihadiri Ketua DPP Golkar Setya Novanto itu.⁹¹

Adanya hubungan yang dibangun oleh Bupati Bone dengan Partai Golkar inilah menjadikan pemanfaatan figur atasan terhadap bawahan yang mampu dimobilisasi untuk hadir dalam kegiatan Partai Golkar. Adanya pemanfaatan figur

⁸⁹George Towar Ikbal Tawakkal, Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009, (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009), h.29.

⁹⁰Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004), h. 207

⁹¹<https://www.bonepos.com/2016/10/waduh-pns-di-bone-diwajibkan-hadiri.html>. diakses tanggal 18 April Tahun 2016 pukul 20.30 Wita

atasan untuk kewajiban memobilisasi birokrasi sesuai dengan yang di ungkapkan oleh S mengatakan:

“Selaku ASN sebenarnya tidak bisa terlibat langsung maupun tidak langsung di acara rapimda partai Golkar akan tetapi Pak Bupati adalah atasan dan saya adalah bawahannya jadi saya harus ikut apa yang di sampaikan oleh atasan maupun itu sebenarnya melanggar undang-undang akan tetapi ini adalah tuntutan atasan jadi saya harus tunduk kepada beliau.”⁹²

Peran dari kekuasaan legitimasi dan adanya pemanfaatan figur atasan yang dipegang oleh Bupati terhadap bawahannya yaitu Pegawai negeri sipil sesuai dengan wawancara diatas sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk hadir dalam kegiatan Rapimda Partai Golkar pada hari Jumat tanggal 21 dan sabtu 22 Oktober 2016. Mobilisasi aparatur sipil negara ditentukan oleh Kekuasaan rezim yang berkuasan. Tingginya intervensi politik terhadap aparatur sipil negara sebagai bawahan mengidentifikasikan bahwa apratur sipil negara di wajibkan untuk hadir dalam acara rapimda partai Golkar dibanding dengan fokus kerja birokrasi tersebut yang tercantum dalam undang-undang kepegawaian, padahal mestinya birokrat yang bagus itu penuh dengan profesionalisme. Hubungan Erat dengan Partai Golkar kepada Bupati Bone sehingga mampu memobilisasi ASN adalah merupakan kekuatan politik yang membantu mobilisasi birokrasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan partai.

Kepercayaan dapat tumbuh sebagai akibat dari hubungan antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Orang yang dikuasai akan melaksanakan semua kehendak yang berkuasa karena kepercayaan bahwa tindakan dan kehendak penguasa akan membawa kebaikan. Yang di kuasai tidak lagi mempertimbangkan

⁹²Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan S, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:43 Tahun, Pada Hari Rabu, 28 Juni 2017

kegunaan dari tindakan-tindakannya itu, selain menaruh kepercayaan yang besar kepada penguasa.⁹³

Kewajiban dalam menghadiri kegiatan Rapimda Partai Golkar Realitas menunjukkan bahwa selama ini birokrasi cenderung menjadi kendaraan politik rezim berkuasa untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya birokrat (pegawai negeri atau aparatur negara) tidak pernah bisa menjadi individu yang bebas dalam menentukan pilihan politik, sesuai dengan diungkapkan oleh R yang mengatakan :

“Kalau itu ya, saya pernah hadir dan ikut dalam kegiatan rapimda Partai Golkar karena ini adalah atasan yang memintah jadi saya hadir dalam kegiatan itu, saya tidak bisa berbuat apa karena adalah perintah atasan.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat Bupati sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Dengan jabatannya juga sebagai Bupati Kabupaten Bone, memberikan kemudahan dirinya untuk menginstruksikan atau memberikan perintah dalam memobilisasi ASN ke kegiatan rapimda Partai Golkar Tahun 2016 kemarin, pengaruh tersebut inilah sebagai salah satu faktor yang membantu kemudahan mobilisasi ke kegiatan rapimda Partai Golkar. Mobilisasi politik yang dilakukan Bupati terhadap Birokrasi berdampak pada penyalahgunaan peranannya selaku atasan birokrat adalah hal yang tidak sesuai aturan namun tetap dijalankan. Kewajiban hadirnya Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan rapimda Partai Golkar Tahun 2016 pada 21 sampai 22 Oktober ini memperlihatkan bahwa sistem birokrasi Negara kita yang sudah semakin memburuk, disebabkan haus

⁹³ Muh. Irfan idris, Nila Sastrawati. *Sosiologi politik*. (Makassar;Alauddin Press, 2009), h.53.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan R, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:50 Tahun, Pada Hari Jumat, 14 Juli 2017

kekuasaan oleh seorang Atasan Birokrasi. Hal tersebut terlihat dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Bupati dalam melanggengkan kekuasaan.

Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem yang tidak akan berubah dalam memberikan pelayanannya kepada masternya, biarpun berganti dengan penguasa yang lain namun pemberian pelayanan tidak berubah. Inilah betapa kuatnya kekuasaan atasan terhadap bawahan yang mampu dimobilisasi, konteks mobilisasi Aparatur Sipil Negara seakan menjadi kewajiban di setiap penyelenggaraan kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Bone.

Kendati kekuasaan membutuhkan kemandirian, hal tersebut sebenarnya lebih cepat jika dikatakan bahwa pihak-pihak tersebut saling tergantung satu sama lain. Satu pihak mungkin akan sangat tergantung kepada pihak lain. Hubungan tersebut menjadi eksis manakala kedua pihak memiliki nilai yang saling dibutuhkan.⁹⁵

Inilah menjadikan hubungan antara Bupati dan Partai Golkar saling ketergantungan sehingga Pegawai negeri sipil yang tak mampu berbuat banyak, akan mudah termobilisasi ke kegiatan Partai Golkar. Seperti yang di kemukakan informan Masjaya yang mengatakan :

“Saya melihat bahwa pelibatan ASN di acara kegiatan Partai Golkar itu adalah sebuah kepentingan jabatan dimana bupati selaku atasan dari ASN di lingkup Kabupaten Bone yang di mobilisasi, memanfaatkan kekuasaan jabatannya sebagai Bupati untuk kepentingan pribadi dan Partai Golkar, sehingga aparatur sipil negara ini tidak bisa berbuat apa dan akhirnya di mobilisasi dalam kegiatan Partai Golkar.”⁹⁶

⁹⁵Sopiah. *Perilaku Organisasional*. (Yogyakarta:CV Andi Offset.2008), h.98.

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Masjaya, Pekerjaan: Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur:35 Tahun, Pada Hari Minggu, 23 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Birokrasi Kabupaten Bone khusus di Kecamatan Lamuru, sangat mudah dimobilisasi oleh pemegang kekuasaan, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Bupati yang Menjabat, istilah jabatan dapat dijadikan suatu ancaman dalam menjalankan aksi mobilisasi tersebut, Pemanfaatan kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Intervensi yang dilakukan oleh Bupati membuat netralitas ASN menjadi diragukan, keberadaan pegawai negeri sipil seharusnya tetap berada pada pelayanan publik, kekhawatiran ketika birokrasi berpihak kepada salah kepentingan penguasa, akan terjadi ASN yang menjadi pelayan penguasa dan akhirnya mobilisasi Aparatur Sipil Negara menjadi sebuah kewajiban birokrasi selain fokus kerja birokrasi sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian dalam yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai unsur aparatur negara pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁷

Kepentingan penguasa menjadi sentral dalam kehidupan dan perilaku birokrasi di Kecamatan Lamuru Kab Bone. Birokrasi yang berorientasi pada profesionalisme dan lepas dari kepentingan politik memang merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa pucuk pimpinan birokrasi adalah para politisi yang mempunyai kedudukan sebagai ketua atau paling tidak duduk dalam jajaran

⁹⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

kepengurusan partai politik yang tentunya mempunyai dasar pemikiran membela kepentingan ideologi ataupun konstituen partainya. Mobilisasi aparatur sipil negara memperlihatkan bagaimana birokrasi diwajibkan untuk hadir dalam rapimda Partai Golkar Tahun 2016. Godaan politik yang besar ini menyebabkan aparatur sipil negara sulit untuk memposisikan diri sebagai birokrasi yang netral. Aparatur sipil negara mudah terjebak dalam agenda kepentingan politik rezim berkuasa. Disamping itu, penguasaan birokrasi atas sumber daya publik bisa membuat birokrasi tumbuh sebagai kekuatan politik tersendiri yang setiap saat mengancam sistem demokrasi.

b. Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah

Penelitian juga menemukan salah satu faktor yang membantu proses mobilisasi aparatur sipil negara di kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) Partai Golkar 21-22 Oktober Tahun 2016, adalah pemanfaatan Fasilitas Pemerintahan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab ini.

Perjalanan politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada.⁹⁸

Sejak penyelenggaraan acara kegiatan Partai Golkar, banyak penggunaan fasilitas pemerintah secara besar besarnya. Bahkan Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Lamuru dijadikan alat untuk memobilisasi pegawai negeri sipil di

⁹⁸Arfan Gaffar. *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*. (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2006), h.230.

kegiatan rampida Partai Golkar pada 21-22 Oktober Tahun 2016. Sementara ASN yang idealnya tidak terlibat mendukung pun terjebak oleh arus politik praktis demi suatu jabatan atau takut untuk ditempatkan pada posisi tanpa jabatan (*non job*).

Seperti yang diketahui bersama bahwa kegiatan rapimda Partai Golkar sering adanya pemanfaatan fasilitas pemerintah baik itu pemanfaatan Camat ataupun Kepala Desa itu sendiri. Ini tentu menjadi salah satu celah yang digunakan dalam memobilisasi untuk menggerakkan kekuatan birokrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Khususnya Di kecamatan Lamuru. Menurut informan R yang mengatakan :

“Bupati yang juga merupakan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone ia mampu memanfaatkan kekuasaan jabatannya dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk memobilisasi ASN untuk hadir dalam kegiatan rapimda Partai Golkar, yaitu Camat dan Kepala Desa sebagai fasilitas pemerintah.”⁹⁹

Hal ini diperkuat argumen oleh M yang mengatakan :

“Pak camat adalah perpanjangan tangan dari Pak Bupati jadi penyampain terkait kegiatan Partai Golkar, saya tahu dari Pak camat karna dia adalah pimpinan wilayah di Kecamatan Lamuru.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam memobilisasi Pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Kab Bone di Kecamatan Lamuru karena inilah merupakan salah satu cara mobilisasi yang secara langsung menggerakkan lapisan birokrasi paling bawah. Kekuatan yang dimiliki oleh kedua aspek tersebut dalam hal ini Camat

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan R, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:50 Tahun, Pada Hari Jumat, 14 Juli 2017

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan M, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:54 Tahun, Pada Hari Sabtu, 24 Juni 2017

dan Kepala Desa dalam memobilisasi pegawai negeri sipil berdasarkan unsur kekuatan atas kekuasaan yang dimilikinya dapat menjadi acuan untuk bagaimana kekuasaan seorang Bupati mampu memanfaatkan kekuasaannya terhadap fasilitas pemerintah.

Hal tersebut sangatlah mudah terjadi, disebabkan pengaruh birokrasi yang berada dibawah naungan Bupati. Sehingga mau tidak mau menurut peneliti, birokrasi akan terjun dengan sendirinya.

Dengan demikian, dalam Rangka reformasi politik menuju kehidupan politik yang lebih demokratis guna menciptakan pemerintahan yang baik, beribawa, dan bersih, maka sudah seharusnya kedudukan PNS dalam kehidupan politik sekarang ini ditinjau kembali.¹⁰¹

konteks birokrasi indonesia elit birokrasi merupakan pejabat karier. Seorang menjadi elit birokrasi seperti seperti direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektorat jenderal. Sekretaris daerah, kepal biro, kepala dinas, kepala bagian, dan lainnya.¹⁰²

Perspektif Analisis wacana pendekatan Talcott Parsons yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif. Jabatan yang dimiliki mejadi salah satu kekuasaan yang

¹⁰¹Arfan Gaffar. *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*. (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2006), h.241.

¹⁰²Damsar. *Pengantar sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Group, 2010), h.223

dimilikinya sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan dan keputusan-keputusan yang negatif.¹⁰³ .

Camat dan Kepala Desa berdasarkan kehadirannya merupakan dua objek yang sangat berbeda. disebabkan berasal dari rahim yang berbeda tetapi tidak menjadikan Camat dan Kepala Desa terpisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadikan fasilitas pemerintah ini Menjadi tidak bisa di pisahkan dalam memobilisasi birokrasi di Kecamatan Lamuru Kabupten Bone di acara rapimda partai Golkar pada tahun 2016 Jumat 21 dan sabtu 22 Oktober. Sesuai yang diungkapkan M yang mengatakan :

*“Partai Golkar merupakan salah satu partai yang besar karna mayoritas seluruh kecamatan dan sekuruh desa di Kabupaten Bone adalah merupakan simpatisan dan kader Partai Golkar, simpatisan dan kader Partai Golkar, pemanfaatan Camat dan Kepala Desa bekerja secara mesin Politik sehingga mampu memobilisasi birokrasi dalam kegiatan partai”.*¹⁰⁴

Hal ini juga di utarakan oleh Usman yang mengatakan :

*“Partai Golkar merupakan partai yang besar yang mampu menggerakkan lapisan masyarakat dan aparatur sipil negara karna partai Golkar menggerakan melalui kepada Desa dan pejabat-pejabat yang ada di lingkup pemerintahan di Kabupaten Bone”.*¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bupati memanfaatkan para fasilitas pemerintah sebagai bahan mesin politik. Sebab berdasarkan pemanfaatan fasilitas pemeritahan sebagai mesin politik, Memberikan keleluasaan atau kemudahan

¹⁰³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), h.63.

¹⁰⁴Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan M, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:54 Tahun, Pada Hari Sabtu, 24 Juni 2017

¹⁰⁵Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Pak Usman, Pekerjaan Imam Masjid Kecamatan Lamuru, Umur:60 Tahun, Pada Hari Sabtu, 10 Juli 2017

dalam memobilisasi pegawai negeri sipil dalam kegiatan rapimda Partai Golkar sesuai dengan yang dikehendaki oleh pimpinan dan partai politik.

Menegaskan bahwa Camat ataupun Kepala Desa kerap berada dalam posisi paling lemah jika kepala daerah yang saat ini kembali terlibat dalam aktivitas politik. Pada saat Kepala Daerah itu kembali kepada aktivitas politik, tidak tertutup kemungkinan dia melakukan penyalahgunaan jabatan. *Setting* inilah yang membahayakan dan posisi ASN paling lemah, jika tidak mengikuti permintaan atasan”. Pelanggaran yang kerap muncul adalah dalam bentuk penggunaan fasilitas pemerintahan dan fasilitas negara seperti kendaraan dinas atau rumah jabatan untuk kepentingan pengerahan atau mobilisasi ASN.

Birokrasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Sebab, birokrasi pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan. Sumber daya dan status birokrasi sebagai sumber kekuasaan jelas menarik bagi kelompok-kelompok kepentingan di dalam maupun di luar birokrasi. Wajar apabila kemudian birokrasi menjadi perebutan kekuatan partai politik melalui politisinya yang menduduki posisi strategis birokrasi. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh S yang mengatakan :

“Peran pak Bupati dalam kegaitan Rapimda Partai Golkar besar karna beliau adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Bone dimana Pak Bupati mampu menggerakkan seluruh lapisan pemerintah aataupun lapisan aparatur sipil negara untuk hadir dalam kegiatan Partai Golkar.”¹⁰⁶

¹⁰⁶Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan S, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:58 Tahun, Pada Hari Rabu, 28 Juni 2017

Peneliti melihat bahwa Keberadaan Partai Politik dalam birokrasi mampu melahirkan kepentingan kekuasaan dan menopang kepentingan untuk mempertahankan Jabatan ataupun posisi strategis dalam pemerintahan. Wewenang yang diberikan kepada Camat atau Kepala Desa sebagai sarana pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Hal tersebut sangatlah mudah terjadi, disebabkan pengaruh birokrasi yang berada dibawah naungan Bupati. Sehingga mau tidak mau menurut peneliti, birokrasi akan terjun dengan sendirinya.

Penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan rapat pimpinan daerah (Rapimda) partai Golkar tidak pernah tuntas dilakukan. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah, berbagai kepentingan terutama berkaitan dengan politik menjadi salah satu permasalahan tersendiri terkait dengan profesionalitas. Mobilisasi aparat sipil Negara memperlihatkan penyalahgunaan fasilitas pemerintah bagi kepentingan partai Golkar merupakan pelanggaran yang acap kali ditemukan dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh informan A yang mengatakan :

“Kegiatan Rapimda partai Golkar Tahun 2016, dimana Camat dan Kepala Desa di suruh membawa massa, dimana 1 mobil dari Aparat kecamatan, aparat desa dan masyarakat.”¹⁰⁷

¹⁰⁷Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:58 Tahun, Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa pemanfaatan fasilitas dalam mobilisasi apaaratur sipil negara dalam kegiatan rapimda partai Golkar terlihat adanya bentuk pengarahannya massa seperti aparat Kecamatan, aparat Desa, dan masyarakat dengan menggunakan mobil. Penggunaan seperti ini merupakan alasan yang menjadikan para birokrat menjadi mudah termobilisasi. Kekuatan akan pemanfaatan fasilitas pemerintahan merupakan hal tidak wajar yang dapat dirasakan oleh para birokrat di Kecamatan Lamuru. Istilah pemanfaatan fasilitas pemerintahan dengan menggerakkan massa merupakan suatu cara mobilisasi yang dapat memudahkan mobilisasi dalam kegiatan kepartaian. Belum lagi sederetan penguasa dari parpol yang pasti akan bekerja keras untuk kepentingan partai yang mengusungnya. Di sanalah godaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah akan sangat mungkin terjadi

Itu semua adalah dampak dari posisi seorang pejabat publik yang juga menyandang kedudukan sebagai petinggi atau pemimpin. Masalahnya, kuatnya cengkeraman penguasa yang menjabat membuat seorang pejabat publik kerap tidak bisa bersikap netral. Makanya selain penegakan aturan soal penggunaan fasilitas pemerintah yang setegas-tegasnya, kita masih berharap para pejabat menunjukkan kepatuhannya yang tulus kepada peraturan.

2. Mobilisasi Tidak Langsung

Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih. mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung

maupun melalui media-media. Mobilisasi tidak langsung, semisal adalah iklan-iklan politik di media massa, seminar-seminar partai, kampanye dialogis, dan lain sebagainya.¹⁰⁸

a. Memanfaatkan Hubungan Kekeluargaan

Keluarga dan politik dalam kebudayaan universal dikelompokkan dalam organisasi sosial. Sehingga antara keluarga dan politik memiliki relasi yang cukup untuk saling mempengaruhi. Posisi politik seseorang atau kelompok tertentu ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Keluarga memiliki peran melahirkan seorang pemimpin politik dengan berbagai macam bentuk dukungan baik dalam bentuk dana maupun moril psikologis.¹⁰⁹

Fenomena politik kekerabatan dapat dikatakan semakin meningkat, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif (DPRD/DPR/DPD) maupun dalam jabatan eksekutif sebagai Kepala Daerah. Politik kekerabatan itu sendiri terjadi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal, terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali.¹¹⁰

Perluasan ide keluarga hingga ke birokrasi negara inilah yang memungkinkan praktik nepotisme yang kita saksikan sehari-hari di Institusi pemerintahan, partai politik, ataupun perusahaan negara. Namun, fenomena ini tidak bisa hanya dipahami sebagai irisan atau perluasan kekuasaan ayah di rumah

¹⁰⁸George Towar Ikbil Tawakkal, Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009, (*Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2009), h.45.

¹⁰⁹Dewi Anggariani, Politik Kekerabatan. (*Jurnal Politik Profetik* Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 2, No 2, Tahun 2013), h.5.

¹¹⁰Titin Purwaningsih, Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan. (*Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h.98

dan di kantor. Sebab, pengandaian keterpisahan yang privat dan yang publik adalah pengandaian modern, yang sama sekali tidak dikenali dalam diskursus kekeluargaan. Dalam praktik politik kekeluargaan setiap ruang diupayakan melipat gandakan struktur keluarga. Sehingga selama itu mungkin dilakukan, setiap ruang adalah ruang privat—bahkan ruang-ruang yang dalam paradigma modern tercakup dalam ranah publik, seperti negara.¹¹¹

Bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan kualitas yang dimiliki, Sesuai dengan fungsi partai politik Sosialisasi Politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya/ dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Inilah yang menjadikan Partai Golkar tetap mendominasi karena kuatnya budaya politik yang dibangun dari generasi ke generasi yang melahirkan pemanfaatan hubungan kekeluargaan di Kabupaten Bone. Sesuai yang diungkapkan Salah satu informan, S juga mengatakan :

“Partai Golkar saat ini masih bagus karena masih banyak orang tua kita masih di Golkar jadi inilah yang menjadikan Partai Golkar tetap kuat sampai saat ini dan mempunyai hubungan erat dengan ASN .”¹¹²

Basis dan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap Partai Golkar masih merupakan kekuatan partai yang sangat besar dan kuat di Kabupaten Bone karna masih banyaknya orang tua dulu yang merupakan kader atau simpatisan Partai Golkar, sehingga pemanfaatan hubungan kekeluargaan inilah bagaimana

¹¹¹<https://indoprogres.com/2014/02/politik-kekeluargaan-dan-kekuasaan-yang-berpusat-pada-tubuh>

¹¹²Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan S, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:43 Tahun, Pada Hari Jumat, 28 Junii 2017

mobilisasi ASN sangat mudah terjadi. Pengaruh hubungan kekeluargaan antara orang-orang tua dulu yang merupakan kader dan simpatisan Partai Golkar dengan keluarganya yang merupakan anggota pegawai negeri sipil inilah menjadikan keluarga menjadi agen mobilisasi politik.

Keluarga seakan menjadi agen mobilisasi politik yang mampu mempengaruhi birokrasi untuk hadir dalam kegiatan Partai Golkar. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh A. Adil yang mengatakan :

*“Hubungan keluarga menjadi faktor mempengaruhi mobilisasi ASN ke acara rapimda partai Golkar tahun 2016 kemarin, karena keluarga adalah orang terdekat jadi ya apa yang dikatakan keluarga pasti mengikuti”.*¹¹³

Hal yang diungkapkan informan A yang mengatakan :

*“Adanya hubungan keluarga juga sehingga ASN dimobilisasi karena keluarga ASN banyak yang merupakan kader dan simpatisan partai Golkar, peran keluarga sangat penting dalam mobilisasi ASN pada kegiatan rapimda partai Golkar tahun 2016”.*¹¹⁴

Hubungan kekeluargaan menjadi faktor mudahnya mobilisasi aparatur sipil negara dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, keluarga yang memiliki anggota PNS pun seringkali mengalihkan dukungannya ke partai mereka baik itu acara kegiatan partai ataupun kampanye. Mengarah pada kekeluargaan yang dijalin karena saling melengkapi kebutuhan bukan melalui dasar paksaan dan mungkin hal ini yang membedakan

¹¹³Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A. Adil, Pekerjaan Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur: 29 Tahun, Pada Hari Selasa, 24 Juli 2017

¹¹⁴Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur: 58 Tahun, Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017

dengan perbudakan. Walaupun terkadang ada rasa kurang berkenan namun itu harus dilakukan karena adanya kebutuhan dan balas jasa. Selama masih bisa bermanfaat bagi penguasa (Bupati Bone) dan partai ataupun sebaliknya, maka hubungan kekeluargaan dalam mobilisasi ASN untuk kepentingan partai atau Bupati dalam mempertahankan kuasanya pun masih akan terjalin.

b. Menggunakan Media Sosial

Media massa dalam arti sempit meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloid dan buletin-buletin pada kantor, sedangkan media massa dalam artai luas biasanya meliputi media cetak, audio, audiovisual, dan media elektronik.¹¹⁵ Semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindakan, dan sikap politik seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera.

Media sosial adalah sebuah media online. Para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial dalam bahasan penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam proses kehidupan demokrasi. Melalui media sosial, komunikator bisa membangun komunikasi politik dengan para pendukungnya, membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif.¹¹⁶

Media sosial menjadi wadah menyampaikan informasi mengenai partai-partai politik. Melalui media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan isu-isu

¹¹⁵Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Group, 2013), h.47.

¹¹⁶Damsar. *Pengantar sosiologi politik*. (Jakarta;Prenadamedia Group, 2010), h.165

atau informasi mengenai aktivitas politik dan partai politik, sehingga media sosial digunakan Bupati atau rezim yang berkuasa untuk memobilisasi ASN ke acara Partai Golkar, sebagaimana yang dikemukakan A yang mengatakan :

*“Ini saya katakan, penyampaian ini sering kali lewat SMS atau WA karna lewat media ini, intruksi yang diberikan oleh Bupati kepada bawahanya untuk hadir dalam kegiatan rapimda Partai Golkar sangat mudah karna informasi ini langsung ke ASN yang bersangkutan untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini”.*¹¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa pengaruh media sosial dalam memobilisasi aparatur sipil negara terbukti nyata lebih mudah karna langsung segera direspons oleh ASN. Karena media sosial khususnya di Kabupaten Bone telah dikuasai oleh elite politik atau rezim yang berkuasa, media sosial dinilai peneliti sudah tidak bersifat tidak netral dalam kalangan birokrat. Pemanfaatan media sosial dalam memobilisasi aparatur sipil negara ke acara kegiatan rapimda Partai Golkar tahun 2016 dapat membahayakan kualitas kerja birokrasi.

Media sosial sifatnya yang memiliki rentang waktu panjang, media sosial memiliki pengaruh signifikan untuk yang sifatnya mobilisasi. Pengguna media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi. Kini kita melihat semakin sering media sosial digunakan untuk menggerakkan massa. Mobilisasi massa kini lebih mudah dengan media sosial dan tentu biayanya juga sangat terjangkau kalau tidak bisa gratis. Selain itu, ekspos media sosial sangat cepat mengambil reaksi.

Sekarang ini, fenomena pemanfaatan media massa sebagai alat politik untuk memobilisasi kepentingan penguasa yang terjadi pada kegiatan rapat

¹¹⁷Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:58 Tahun, Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017

pimpinan daerah (Rapimda), bagaimana media sosial mejadi alat untuk memobilisasi aparatur sipil negara dalam kegaitan rapimda partai Golkar Tahun 2016. Media sosial menjadi alat politik yang menjadikan kepentingan politik penguasa akan mudah tercapai. oleh karena itu, peran media sosial dalam kegiatan rapimda partai Golkar tahun 2016 sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memobilisasi aparatur sipil negara.

C. Respon Masyarakat Terhadap Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Partai Golkar

Selama sepuluh tahun terakhir masa reformasi, politik di Kabupaten Bone berkembang relatif stabil dalam pengertian pemerintahan berlangsung secara terkendali dan masyarakat bekerja sebagaimana ‘business as usual.’ Paradigma Reformasi yang menandai transisi politik dari pemerintahan otoritari menuju pemerintahan demokratis disikapi sebagai perkembangan (perubahan) yang memang sudah seharusnya terjadi tanpa harus mengubah secara fundamental praksis penyelenggaraan pemerintahan yang selama itu sudah berjalan. Ini juga berarti bahwa paradigma Reformasi kurang terlihat telah memberikan efek kejut yang mendorong perubahan politik mendasar di Kabupaten Bone.

Khususnya pengertian ini, meskipun mengikuti pembaharuan/perubahan kelembagaan politik sebagai yang terjadi di daerah-daerah lain karena program desentralisasi, Kabupaten Bone tampak bertahan dengan struktur, aktor, dan pola hubungan politik yang selama ini telah berlangsung dengan mapan. Penelitian ini

menghasilkan konfigurasi atas terpeliharanya secara relatif karakter politik semacam itu.¹¹⁸

Persepektif politik kontemporer, pada substansinya menggambarkan persaingan pengaruh partai politik di daerah yang bersangkutan. Dalam secara politik orde baru hingga Reformasi saat ini Partai Golkar adalah partai yang sangat menonjol dan dominan. Diakui atau tidak, Golkar merupakan satu-satunya partai politik yang penuh dengan sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang politik pemerintahan. Bone mempunyai makna yang penting. Kabupaten Bone bukan saja merupakan wilayah tempat bergeraknya tradisi kebangsawanan Bone, terpelihara dan berpengaruh dalam dinamika politik tersebut, tetapi juga merupakan wilayah tempat Golkar berhasil memapankan hegemonik politiknya.¹¹⁹

1. Respon Masyarakat Yang Tidak Setuju

Hilangnya sikap netral birokrasi ini maka muncullah kondisi yang mengabaikan tugas birokrasi, Bupati Bone sebagai penguasa, memunculkan praktek keberpihakan pada pihak tertentu yang tidak lain tidak bukan adalah berpihak kepada Partai Golkar sehingga yang seharusnya birokrasi itu netral dari kegiatan-kegiatan politik menjadi tidak netral lagi. Seperti yang dituturkan oleh informan Muh. Idris yang mengatakan :

“Pelibatan pegawai negeri sipil Kecamatan Lamuru pada kegiatan rapimda Partai Golkar sebenarnya tidak bisa dan saya tidak setuju dengan hal itu, karna sudah ada dalam undang-undang, akan tetapi ini yang menjadi masalah karna Bupati sendiri yang

¹¹⁸R.Siti Zuhro Dkk. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. (Yogyakarta: Ombak, 2009), h.104.

¹¹⁹R.Siti Zuhro Dkk. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. (Yogyakarta: Ombak, 2009), h.109.

*memobilisasi pegawai negeri sipil karna Bupati adalah atasan mereka dan juga Bupati selaku Ketua DPD Partai Golkar Kab Bone.*¹²⁰

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh informan Masjaya yang mengatakan :

*“Respon saya ketika mengetahui hal ini tentang bagaimana ASN Kecamatan Lamuru dilibatkan dan di mobilisasi untuk acara kegiatan rapimda partai Golkar itu adalah saya tidak setuju, ini sebuah kepentingan dimana Bupati selaku atas dari Birokrasi ini yang mobilisasi memanfaatkan kekuasaannya sebagai Bupati untuk kepentingan pribadi dan partai, ASN pun tidak bisa berbuat apa-apa karna disatu sisi harus netral sesuai tetapi satu sisilainya harus taat kepada atasan karna sering adanya pemberian sanksi.”*¹²¹

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat pada dasarnya tidak setuju dengan mobilisasi aparatur sipil negara seperti ini, sangat merugikan bagi seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara. Mobilisasi aparatur sipil negara yang dilakukan seperti ini dikarenakan sudah tidak layak dan sudah tidak fokus lagi dengan pekerjaan mereka, birokrasi sudah jadi saran kepentingan politik. Tingginya intervensi ke aparatur sipil Negara dari rezim yang berkuasa sehingga membuat birokrasi tidak mampu bersikap netral. Birokrasi yang seharusnya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah aktivitas politik partai politik.

Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Sebab, birokrasi baik langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kepentingan politik khususnya kegiatan mobilisasi politik, Seperti yang diungkapkan oleh informan H. Najamuddin yang mengatakan:

“Saya dengan-dengar memang ada mobilisasi ASN kegiatan rapimda Partai Golkar, mengenai hal itu sangat tidak baik

¹²⁰Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Muh Idrsis , Pekerjaan Petani Kecamatan Lamuru, Umur:42 Tahun, Pada Hari Sabtu, 29 Juli 2017

¹²¹Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Masjaya, Pekerjaan Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur:37 Tahun, Pada Hari Minggu, 23 Juli 2017

apabila ASN di mobilisasi untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan partai politik, tetapi, yang disayangkan adalah penyalagunaan kekuasaan untuk kepentingan partai.”¹²²

Hal serupa juga di jelaskan informan Usman yang mengatakan :

“Pelibatan ASN Kecamatan Lamuru pada kegiatan rapimda Partai Golkar, saya tidak setuju dan sudah melanggar etika pemerintahan yang baik, itu sudah jelas penyalagunaan kekuasaan untuk kepentingan partai bukan kepentingan pelayanan masyarakat.”¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa respon masyarakat kurang menerima dengan mobilisasi ASN di acara Parati Golkar di karenakan pelibatan atau mobilisasi ASN dalam kegiatan rapimda Partai Golkar Tahun 2016 yang dilaksanakan di Ibu kota Kabupaten Bone sudah menyalahi etika pemeritahan yang baik dan kurangnya lagi kepedulian kepada pelayanan masyarakat. Alasan masyarakat ini membuktikan bahwa pelayanan seorang birokrat hanya tertuju pada pelayanan kepada atasan bukan tertujuh kepada pelayanan masyarakat.

Perspektif dalam teori Birokrasi dan Good Governance, dimana Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang tersetruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis dan dijalankan oleh bagian tertentu dan terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahliannya dibidangnnya.¹²⁴ Sedangkan Secara umum, *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang

¹²²Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan H. Najamuddin, Pekerjaan Petani Kecamatan Lamuru, Umur:68 Tahun, Pada Hari Jumat,15 Juli 2017

¹²³Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Usman, Pekerjaan Imam Masjid Kecamatan Lamuru, Umur:60 Tahun, Pada Hari Sabtu, 10 Juli 2017

¹²⁴Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2011), h.59

berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.¹²⁵

Dimana di wawacanakan mejadikan birokrasi yang netral dari bentuk kegiatan politik apapun dan menjadikan pemerintahan yang baik dalam urusan-urusan publik itu sudah tidak berjalan baik sesuai dengan realitas di lapangan. Pada dasarnya, birokrasi seharusnya merupakan organ pelaksana dari konsepsi ataupun kebijakan politik, dan tidak ikut dalam aktivitas politik, tetapi praktek birokrasi menunjukkan hal sebaliknya.

Apabila birokrasi terus berpolitik untuk dijadikan instrumen kekuasaan bagi para politisi maka peranannya akan semakin tereduksi dari tujuan semula dibentuknya birokrasi. Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh politik dan kekuasaan, kondisi ini telah melekat dalam tingkah laku maupun perilaku birokrasi saat ini. Fungsi birokrasi tidak berjalan semestinya, seharusnya menjadi pelayan masyarakat menjadi sebaliknya yaitu birokrasi cenderung mengabdikan kepada penguasa untuk kepentingan kekuasaan. Kenetralan tidak lagi menjadi nilai yang harus dipertahankan, banyaknya mesin-mesin pemerintah telah beralih haluan yang lebih mementingkan kepentingan penguasa. Kehadiran birokrasi tidak luput dari berbagai kegiatan yang ditumpangi dengan ketidaknetralan dari birokrasi yang melibatkan birokrat masuk dalam arena aktivitas politik.

¹²⁵ Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (*Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI No. 1 / Juni 2016 Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama Bandung Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama Bandung, 2016), h.4.

2. *Respon Masyarakat Yang Setuju*

Sistem pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga jika pemimpinnya dirasakan baik, maka masyarakat pasti akan terus memujinya dan seharusnya tidak terlibat aktivitas politik. Seperti yang dikatakan oleh informan M yang mengatakan :

*“Selaku pemerintah harus memfasilitasi partai lain ataupun Partai Golkar lewat dukungan moril atau bantuan apa saja selaku pemerintah yang netral terhadap partai politik”*¹²⁶

Hal ini juga dipertegas informan, A.Adil yang mengatakan :

“Selaku masyarakat melihat ya, saya setuju kalau hanya memfasilitasi Partai Golkar baik itu lewat dukungan-dukungan moril dan bantuan sebagaimana selaku pemerintah ya harus netral dari aktivitas politik seperti ini”.¹²⁷

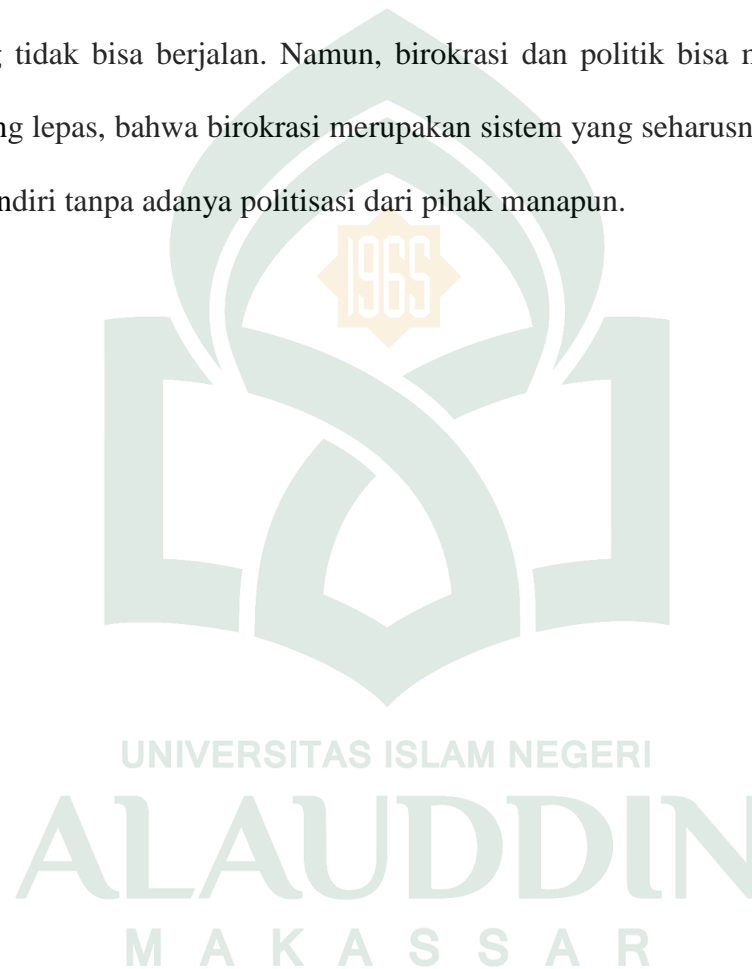
Peneliti pun melihat dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat setuju saja kalau hanya memberikan fasilitas atau dukungan moril dan bantuan sebagainya kepada partai dan tidak terlibat dalam aktivitas dalam kegiatan rapimda partai Golkar Tahun 2016, sehingga sikap Netralitas birokrasi pada hakikatnya tetap terwujud. Alasan masyarakat setuju karena melihat bahwa Dukungan-dukungan yang berikan hanya sekedar pemberian bantuan selaku pemerintah sebagai pelayanan publik, sikap netral selaku pemerintah tetap terjaga dalam aktivitas politik partai politik sehingga inilah yang menjadikan masyarakat setuju.

Birokrasi yang baik adalah ketika mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak terlibat aktivitas politik lainnya. Bahwa tuntutan

¹²⁶Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan M, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:54 Tahun, Pada Hari Sabtu, 24 Juni 2017

¹²⁷Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A.Adil, Pekerjaan Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur:29 Tahun, Pada Hari Selasa, 24 Juli 2017

reformasi birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan kondisi dimana masyarakat semakin responsif terhadap tindakan birokrat. Sementara itu birokrasi dan politik saling berhubungan, karena terkadang proses administrasi baru bisa berjalan setelah proses politik selesai dilakukan. Begitu pula sebaliknya proses politik tanpa implementasi proses birokrasi terkadang tidak bisa berjalan. Namun, birokrasi dan politik bisa menjadi gejala yang saling lepas, bahwa birokrasi merupakan sistem yang seharusnya bisa netral, berdiri sendiri tanpa adanya politisasi dari pihak manapun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Partai Golkar Tahun 2016 ada beberapa bentuk memobilisasi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam kegiatan Partai Golkar tahun 2016 diantaranya ialah :

- a. Mobilisasi Secara Langsung ada beberapa proses mobilisasi, yaitu :
 1. Kewajiban Hadir Di Acara Partai Golkar, Penyalahgunaan kekuasaan seorang penguasa seakan menjadi kewajiban kepada bawahannya hadir dalam kegiatan rapimda Partai Golkar tahun 2016. Menunjukkan bahwa selama ini birokrasi cenderung menjadi kendaraan politik rezim berkuasa.
 2. Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah, Kekuatan akan pemanfaatan fasilitas pemerintahan merupakan hal dirasakan oleh para birokrat di Kecamatan Lamuru. Istilah pemanfaatan fasilitas pemerintahan merupakan suatu cara mobilisasi yang dapat memudahkan mobilisasi setiap kegiatan kepartaian Partai Golkar.
- b. Mobilisasi Tidak Langsung terdapat beberapa proses mobilisasi, yaitu :
 1. Memanfaatkan Hubungan Kekeluargaan, Keluarga seakan menjadi agen mobilisasi politik yang mampu mempengaruhi birokrasi untuk hadir dalam kegiatan Partai Golkar.

Hubungan kekeluargaan dalam mobilisasi ASN untuk kepentingan partai atau Bupati Bone dalam mempertahankan kuasanya.

2. Penggunaan Media Sosial, Media sosial digunakan Bupati atau rezim yang berkuasa untuk alat mobilisasi ASN ke acara Partai Golkar.

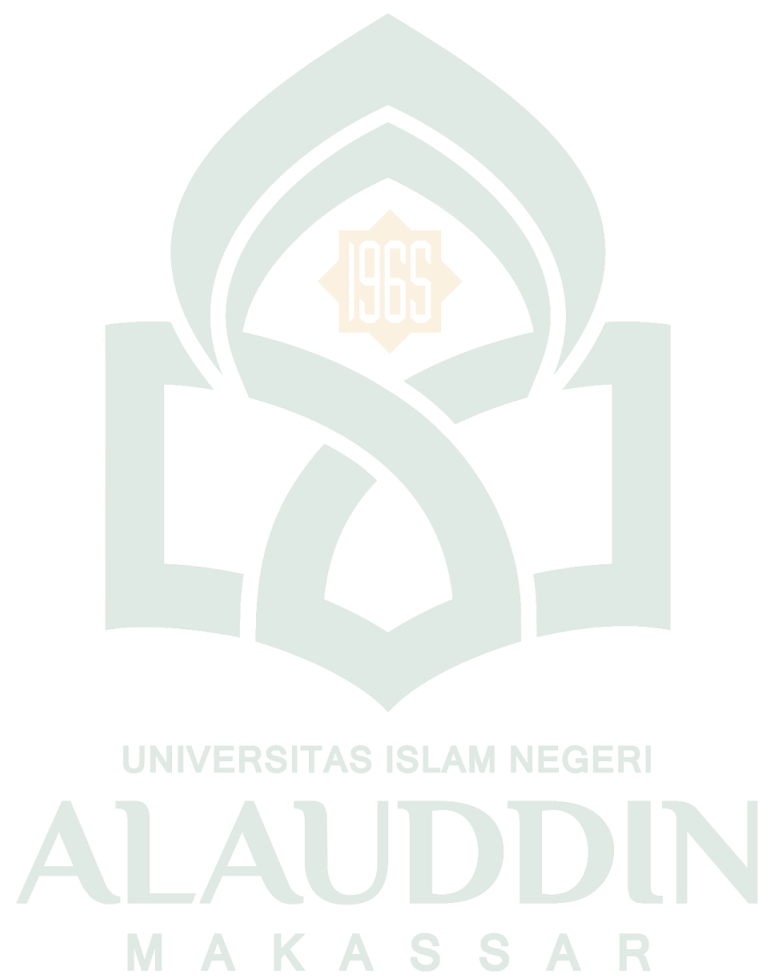
2. Respon Masyarakat Terhadap Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Partai Golkar, terdapat 2 macam respon Masyarakat, yaitu :

- a. Respon tidak setuju dengan mobilisasi ASN, Respon masyarakat yang kurang menerima dengan mobilisasi ASN di acara Partai Golkar dikarenakan pelibatan atau mobilisasi PNS dalam kegiatan Partai Golkar sudah menyalahi etika pemerintahan yang baik dan kurangnya lagi kepedulian kepada pelayanan masyarakat.
- b. Respon yang setuju dengan mobilisasi ASN, masyarakat setuju karena melihat bahwa Dukungan-dukungan yang diberikan hanya sekedar pemberian bantuan selaku pemerintah sebagai pelayanan publik, sikap netral selaku pemerintah tetap terjaga dalam aktivitas politik partai politik

B. Implikasi Penelitian

1. Adanya pengawasan yang jelas untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan ASN di Kecamatan Lamuru dalam acara partai politik di Kabupaten Bone
2. Bagi Mahasiswa, agar kiranya terus memperhatikan proses perpolitikan yang terjadi dan tidak ketinggalan terhadap berita-berita mengenai perpolitikan agar ketika ada perubahan-perubahan yang bisa mengancam sistem

demokrasi indonesia khususnya sistem birokrasi agar bisa juga turut andil dalam perubahan-perubahan itu dan memperbaikinya.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Patria, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, *Jurnal*, Bandar Lampung: Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2015.
- Abdullah, Faisal. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Al Nawawi. *Mutiara Riyadushshalihin*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2014
- Altohoff Phillip, Michael Rush. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anggariani, Dewi. Politik Kekerabatan. (*Jurnal Politik Profetik* Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 2, No 2, Tahun 2013
- Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bungin, Burhan. *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Damsar. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2010.
- Daniarsyah, Dida. *Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia*, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume V No. 2 / Desember 2015.
- Efriza. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Erman M, Rizki Muharlin Rayadi. Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011), *Jurnal Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 1, No 1, 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

- Fakhruddin, M.Anas. *Model Hubungan Antara Birokrasi Dan Politisi Di Indonesia*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2012), Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 02, Desember 2012.
- Gaffar,Arfan. *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2006.
- Gaffar, Arfan. “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, *Dalam Syarofin Arba (Editor), Demotologi Politik Indonesia: Mengusung Elitism Dalam Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Firmansyah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Halwan Yamin, Muhammad. Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Hidayatullah, Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpns Di Kabupaten Barru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Iffatun Nisa, Noviah. *Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum*, skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember 2016
- Ikbal Tawakkal, Gatot Sudjito. *Negara Dan Golkar Studi Tentang Konfigurasi Politik Tahun 1971-2009*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.
- Jasin, Moch. *Birokrasi Zero Korupsi*, Jakarta, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI,2013.
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi Dan Kepentingan*, Makassar, PT.Gramasurya. 2015.
- Jurdi , Syarifuddin. *Ilmu Politik Profetik*, Makassar, PT. Gramasurya. 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Duta Surya, 2012.
- Kencana, Inu. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.2013.
- Khairul Anwar, Fitria Ramadhani Agusti Nasution. *Politik Mobilisasi Dalam Konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Kota Pekanbaru*

- Tahun 2011*, jurnal ilmu pemerintahan, volume 11, nomor 1, Januari 2011.
- Martini, Rina. *Birokrasi Dan Politik*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.
- Maryam, Neneng Siti, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI No. 1 / Juni 2016
Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama Bandung
Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama Bandung, 2016
- Muslim , Al Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Kuala Lumpur:Klang Book Centre,2007
- Ngadisah, Darmanto. *Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- Nugroho, Kris. Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral, *Jurnal*, Volume 24, Nomor 3.2011
- Nursal, Adman. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2004.
- Pawestri, Shalikhatin. Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel *Bibir Merah* Karya Achmad Munif, *Skripsi*, Program Studi Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.2015
- Purwaningsih, Titin. Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan. (*Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)
- P. B, Santoso. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1997,
- Rachman, Arief . Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akutansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2014.
- Ratnawati, *Sistem Kepartaian di Era Transisi*,Fisipol UGM. 2006.
- Setiyono, Budi. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Semarang: Penerbit Puskodak FISIP UNDIP, 2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV .Alfabet, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suryono, Agus. *Birokrasi dan Kearifan Lokal*. Malang, UB press, 2012.

Sudrajat Tedi, Agus Mulya Karsona. Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Media Hukum*, 9 Februari 2016 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2016.

Syamsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method)*. Makassar: Wade Group, 2015

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Suaka Media, 2015.

Suryono, Agus. *Pendekatan Kultural Dan Struktural Dalam Realitas Birokrasi Di Indonesia*, Malang, jurnal, Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.

Usman Kolip, Elly M. Setiadi,. *Pengantar Sosiologi politik*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2013.

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

UU Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Zuhro, R.Siti Dkk. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak, 2009

Yuliani, Sri. Netralitas Birokrasi : Alat Politik Atau Profesionalisme, Semarang, *Jurnal Dinamika, Fisip Uns*” Vol.3 No.2 Th.2003.

Dapat dilihat [Http://www.kompasiana.com/elipheldan/birokrasi-vs-politik](http://www.kompasiana.com/elipheldan/birokrasi-vs-politik) diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 13:37 wita

Dapat dilihat [Http://HMI Bone Sesalkan Keterlibatan PNS di Rapimda Golkar _ Rakyat Sulsel.html](http://HMI Bone Sesalkan Keterlibatan PNS di Rapimda Golkar _ Rakyat Sulsel.html), diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 20.05 Wita.

Dapat dilihat <https://ilmupemerintahan.wordpress.com/tag/netralitas-birokrasi/> diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 14:30

Dapat dilihat <https://www.bonepos.com/2016/10/soal-atribut-partai-golkar-di-kantor.html>. diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 20.30 Wita

Hasil Wawancara :

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Maezur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:54 Tahun, Pada Hari Sabtu, 24 Juni 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Suhardi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:43 Tahun, Pada Hari Rabu, 28 Juni 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Ramli, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:50 Tahun, Pada Hari Jumat, 14 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Pak Usman, Pekerjaan Imam Masjid Kecamatan Lamuru, Umur:60 Tahun, Pada Hari Sabtu, 10 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan H.Najamuddin, Pekerjaan: Petani Kecamatan Lamuru, Umur:70 Tahun, Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017

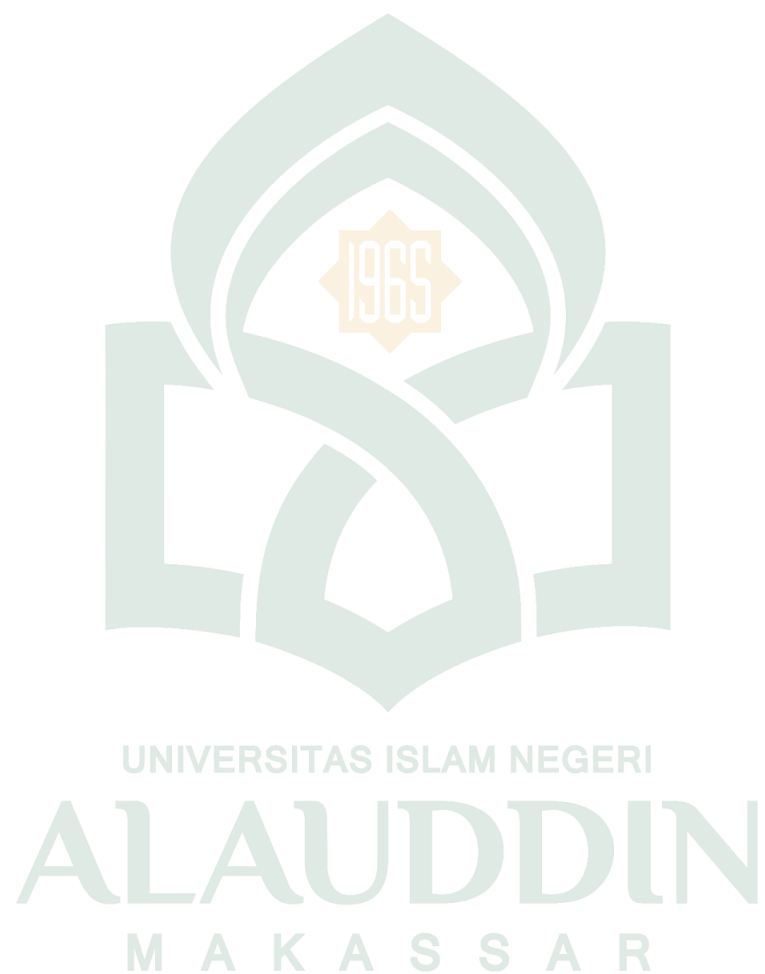
Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Aziz, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lamuru, Umur:58 Tahun, Pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Masjaya, Pekerjaan: Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur:35 Tahun, Pada Hari Minggu, 23 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Asri, Pekerjaan: Petani Kecamatan Lamuru, Umur:27 Tahun, Pada Hari Minggu, 21 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan A.Adil, Pekerjaan Wiraswasta Kecamatan Lamuru, Umur:29 Tahun, Pada Hari Selasa, 24 Juli 2017

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Informan Muh Idrsi, Pekerjaan Petani
Kecamatan Lamuru, Umur:42 Tahun, Pada Hari Sabtu, 29 Juni 2017



L
A
M
P
I
R
A
N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DOKUMENTASI

BERSAMA USTADS USMAN T



BERSAMA PAK AZIZ



BERSAMA MUH IDRIS



BERSAMA PAK NAJAMUDDIN



BERSAMA PAK SUHARDI



BERSAMA A.ADIL





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8508/S.01P/P2T/06/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Nomor : B-89/FUF/PP.00.9/06/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD MAULANA YUSUF RAMLI
Nomor Pokok : 30600113077
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **BIROKRASI DAN AKTIVITAS POLITIK (STUDI TERHADAP MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE DALAM KEGIATAN PARTAI GOLKAR TAHUN 2016)** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Juni s/d 07 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR
A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.642/VI/IP/DPMPTSP/2017

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **MUHAMMAD MAULANA YUSUF RAMLI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 30600113077
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"BIROKRAT DAN AKTIVITAS POLITIK (STUDI TERHADAP MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE DALAM KEGIATAN PARTAI GOLKAR TAHUN 2016.)"

Lamanya Penelitian : 21 Juni 2017 s/d 21 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Lamuru Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Juni 2017

KEPALA,


Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Camat Lamuru Kab. Bone di Lalebata
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD MAULANA YUSUF RAMLI, Nim 30600113077, putra dari pasangan Bapak Ramli Marzuki, S.Sos, M.Si & Andi Suheriaty. Lahir 23 Januari 1995 di Lalabeta Kec Lamuru Kab Bone. Latar belakang penulis diawali

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 10/73 Lalebata 2002-2007, penulis melanjutkan sekolahnya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 1 Lamuru lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan Sekolahnya di SMAN 1 Lamuru yang berubah nama menjadi SMAN 17 BONE dan tamat pada tahun 2013, juga pada tahun ini yakni 2013 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur seleksi Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan lulus di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan Politik, jurusan Ilmu Politik hingga tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul, **“BIROKRAT DAN AKTIVITAS POLITIK (Studi Kasus Rapimda Partai Golkar Tahun 2016)”**

Selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, penulis pernah aktif dalam organisasi Ekstra Kampus antara lain: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Lamuru (IPMAL-BONE) Sebagai Sekretaris DPA pada periode 2016-2017.